



**ANALISIS YURIDIS PEMBAYARAN MELALUI INTERNET BANKING  
DENGAN MENGGUNAKAN *LETTER OF CREDIT***

**DI BANK BRI UNIT 3 KOTA TEGAL**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh :**

**AUDI REYHAN ADHISTI**

**5115500027**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2020**

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBAYARAN MELALUI INTERNET BANKING  
DENGAN MENGGUNAKAN *LETTER OF CREDIT* DI BANK BRI UNIT 3  
KOTA TEGAL**

**Disusun Oleh :**

**AUDI REYHAN ADHISTI  
NIM. 5115500027**

**Telah diuji dan dipertahankan dihadapan Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :  
Hari : Jum'at  
Tanggal : 8 Mei 2020**

**Penguji I**



**FAJAR DIAN ARYANI, S.H., M.H  
NIDN. 0608087702**

**Penguji II**



**H. TONI HARYADI, S.H., M.H  
NIDN. 0020045801**

**Pembimbing I**



**DR. H. SANUSI, S.H., M.H  
NIDN. 0609086202**

**Pembimbing II**



**TIYAS VIKA WIDYASTUTI, S.H., M.H.  
NIDN. 0619058703**

**Mengetahui  
Dekan,  
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal**



**Dr. H. ACHMAD IRWAN HAMZANI, S.H.I., M.Ag.  
NIDN. 0615067604**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBAYARAN MELALUI INTERNET BANKING  
DENGAN MENGGUNAKAN *LETTER OF CREDIT* DI BANK BRI UNIT 3  
KOTA TEGAL**

**Disusun Oleh :**

**AUDI REYHAN ADHISTI  
NIM. 5115500027**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :**

**Pembimbing I**



**DR. H. SANUSI, S.H., M.H  
NIDN. 0609086202**

**Pembimbing II**



**TIYAS VIKA WIDYASTUTI, S.H., M.H.  
NIDN. 0619058703**

## **KEASLIAN SKRIPSI**

**YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :**

**NAMA : AUDI REYHAN ADHISTI**

**NPM : 5115500027**

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI DENGAN JUDUL “ANALISIS YURIDIS PEMBAYARAN MELALUI INTERNET BANKING DENGAN MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT DI BANK BRI UNIT 3 KOTA TEGAL” INI BESERTA SELURUH ISINYA ADALAH BENAR-BENAR KARYA SAYA SENDIRI DAN SAYA TIDAK MELAKUKAN PENJIPLAKAN ATAU PENGUTIPAN DENGAN CARA-CARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN ETIKA KEILMUAN YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT KEILMUAN.

SAYA MENYERAHKAN SKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN DIDALAMNYA MENJADI MILIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL SERTA MEMBERIKAN IJIN UNTUK MERECOVERY DAN MEMPUBLIKASIKAN DALAM BENTUK JURNAL BAIK ATAS NAMA SAYA ATAUPUN TIDAK MELIBATKAN SAYA.

ATAS PERNYATAAN SAYA INI, SAYA SIAP MENANGGUNG RESIKO/SANKSI YANG DIJATUHKAN KEPADA SAYA APABILA DITEMUKAN ADANYA PELANGGARAN TERHADAP ETIKA KEILMUAN DALAM KARYA SAYA INI ATAU ADA KLAIM DARI PIHAK LAIN TERHADAP KARYA SAYA INI.

Tegal, Juli 2020

Yang menyatakan



## **MOTTO**

***NIKMATILAH SEGALA PROSES***

***NIKMATILAH SEGALA KETIDAKPASTIAN***

***SADARILAH BAHWA KESULITAN DAN TANTANGAN***

***ADA UNTUK MEMBENTUKMU MENJADI LEBIH BAIK***

***JANGAN BERHENTI BERJUANG***

***JANGAN BERHENTI BERSYUKUR***

***JANGAN BERHENTI PERCAYA***

***SEMUA AKAN INDAH PADA WAKTUNYA***

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Pertama penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya
2. Papah Mamah selaku orang tua penulis yang penulis cintai dan yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
3. Pragustina selalu memberikan semangat, motivasi, dan dorongan sehingga cepat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Zulfi Malik,Risky Chandra,Yogi Miftahudin yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
5. Teruntuk Keluarga dan Teman-teman yang selalu menanyakan kapan lulus.

## ABSTRAK

Dalam pembiayaan L/C, eksportir berhak menerima pembayaran atas pengajuan dokumen-dokumen yang memenuhi persyaratan L/C. Adanya pemenuhan dokumen-dokumen oleh ekportir menyebabkan bank yang ditunjuk (*nominated bank*) dapat berupa bank penegosiasi (*negotiating bank*), bank pembayar (*paying bank*), atau bank pengaksep (*accepting bank*), akan membayar tagihan eksportir atas pengajuan dokumen-dokumen yang memenuhi persyaratan L/C. Selanjutnya bank penerbit akan melakukan penggantian pembayaran kepada bank yang ditunjuk karena telah melakukan pembayaran kepada eksportir. Pokok permasalahan yang disampaikan dalam skripsi ini adalah bagaimana bagaimana hubungan antara *sales contract* yang dibuat antara penjual dengan pembeli terhadap pemeriksaan dokumen-dokumen yang sedang dinegosiasikan dalam L/C yang mengandung penipuan dan tindakan bank penerbit apabila ada permohonan penolakan pembayaran yang diajukan oleh importir karena terdapat penipuan terhadap dokumen dalam L/C.

Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan (normatif) yang berupa penemuan hukum *in concreto*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi documenter serta wawancara sebagai data pendukung. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis.

Hasil penelitian dalam hal terjadi penipuan, tidak dibayarnya *beneficiary* oleh bank penegosiasi karena terdapat penipuan dokumen (*forged or fraudulent document*) merupakan bukti batal demi hukumnya prinsip keterikatan dokumen. Selanjutnya karena adanya penolakan pembayaran dari bank penegosiasi terhadap *beneficiary*, menimbulkan antara L/C dengan kontrak-kontrak lainnya termasuk *sales contract* yang akan menjadi satu kesatuan. Sehingga dapat saja bank penerbit menolak permohonan penolakan pembayaran dari *beneficiary* apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan pengecualian penipuan tidak berlaku atau dengan kata lain tindakan bank penerbit dapat menerima atau menolak permohonan penolakan pembayaran. Kata kunci: Penipuan dokumen, *Letter of Credit*

## **ABSTRACT**

In L / C financing, the exporter is entitled to receive payment submission of documents that meet the L / C requirements. There is fulfillment documents by the exporter cause the nominated bank can be in the form of a negotiating bank, a paying bank, or the accepting bank, will pay the exporter's bill submission of documents that meet the L / C requirements. Next is the bank the issuer will make reimbursements to the designated bank due has made payment to the exporter. The main problem which is presented in this thesis is how the relationship between sales a contract made between the seller and the buyer for examination of documents which is being negotiated in a fraudulent L / C and action of the issuing bank if there is a request for refusal of payment submitted by the importer because of fraud against the documents in the L / C. This research is a literature law research (normative) in the form of discovery of law in concreto. The data collection method was carried out by study literature and documentary studies and interviews as supporting data. Data collected then presented in the form of narrative text arranged in a manner systematic. Research results in the event of fraud, the beneficiary is not paid by negotiation bank due to document fraud (forged or fraudulent document) is proof of null and void the principle of document binding. Next because of the refusal of payment from the negotiating bank against the beneficiary, raises between L / C and other contracts, including sales contracts which will become one unit. So that the issuing bank may refuse request for refusal of payment from the beneficiary if there are things that are causes the fraud exception to be invalid or in other words action the issuing bank can accept or reject the request for refusal of payment. Keywords: Document fraud, Letter of Credit



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT, Alhamdulillah penulisan penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum (Rektor Universitas Pancasakti Tegal)
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
4. Dr. H. Sanusi, S.H., M.H (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
5. Imam Asmarudin, S.H., M.H (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
6. Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
7. Dr.H. SANUSI, S.H.,M.H (Dosen Pembimbing I), TIYAS VIKA WIDYASTUTI, S.H., M.H (Dosen Pembimbing II yang telah berkenan

memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Bapak Endro Adibroto dan Ibu Munifah selaku orang tua serta saudara-saudara penulis yang telah memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Mei 2020

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Transaksi Ekspor Impor .....	11
1. Pengertian Transaksi Ekspor Impor .....	11
2. Pihak-Pihak Dalam Transaksi Ekspor Impor .....	14
3. Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor Impor .....	15

B. Tinjauan Umum <i>Letter of Credit</i> (L/C) .....	18
1. Pengertian <i>Letter of Credit</i> (L/C) .....	18
2. Klasifikasi <i>Letter of Credit</i> (L/C) .....	19
3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam <i>Letter of Credit</i> (L/C) .....	33
4. Perjanjian Dasar Pembukaan <i>Letter of Credit</i> (L/C) .....	37
5. Prosedur Pembukaan <i>Letter of Credit</i> (L/C) .....	40
6. Dokumen-Dokumen Dalam <i>Letter of Credit</i> (L/C) .....	43
7. Pembayaran <i>Letter of Credit</i> (L/C) .....	61
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	67
A. Pendekatan permasalahan .....	67
B. Karakteristik penelitian .....	67
C. Sumber dan jenis bahan penelitian .....	68
D. Pengumpulan bahan penelitian .....	69
E. Analisis bahan penelitian .....	69
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
 DAFTAR PUSTAKA .....	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Transaksi perdagangan luar negeri merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu perdagangan yang lazim dikenal dengan perdagangan ekspor impor. Perdagangan ini merupakan suatu transaksi sederhana, yaitu membeli dan menjual barang antar pengusaha yang masing-masing bertempat tinggal di negara-negara yang berbeda<sup>1</sup>.

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini berkembang dengan pesat dan cepat. Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi informasi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban umat manusia. Ekspor impor dewasa ini sering juga disebut sebagai bisnis dokumen atau bisnis surat berharga<sup>2</sup>.

Hal ini disebabkan realisasi suatu transaksi pada umumnya diwakili oleh dokumen-dokumen pengapalan seperti Bill of Lading, faktur perdagangan, draft, polis asuransi dan lainnya. Pengertian dari Letter of

---

<sup>1</sup> Etty Susilowati Suhardo, Cara Pembayaran dengan *Letter of Credit* dalam Perdagangan Luar Negeri (Semarang: FH UNDIP, 2001), hal. 5

<sup>2</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 4.

Credit itu sendiri adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan pada eksportir diluar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Bank penerbit L/C menjamin untuk mengakseptir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat tersebut. Segala ketentuan praktek dan kebiasaan kredit berdokumen terdapat didalam ketentuan yang dikenal sebagai The Uniform Customs and Practice for Documentary.

Sebagaimana yang dikatakan H. M. N Purwosutjipto, bahwa dipandang dari sudut jual beli perusahaan, perbuatan ekspor impor adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup. Ekspor impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli diseberang lautan. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sedangkan unsur kedua adalah pembayaran.

Jual beli secara umum diatur KUHPerdato., sedangkan jual beli perdagangan tidak diatur dalam KUHPerdato maupun KUHD, melainkan berdasarkan perjanjian antara pihak-pihak, dan kebiasaan yang berlaku dalam Mengingat jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian, maka perjanjian jual beli tunduk pada Hukum Perjanjian pada umumnya. Batasan tentang perjanjian dalam Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana

satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih<sup>3</sup>. Sebagai ketentuan umum, KUHPerdara tetap berlaku terhadap jual beli perdagangan sepanjang tidak diperjanjikan secara khusus menyimpang.

Bagi perkembangan perekonomian Indonesia, transaksi ekspor impor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting, karena dapat meningkatkan pencarian sumber-sumber devisa yang antara lain adalah meningkatkan transaksi-transaksi ekspor dan menekankan pengeluaran-pengeluaran devisa dengan cara membatasi aktivitas-aktivitas impor. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya dalam penelitian ini akan digunakan istilah UU Perbankan), bahwa sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan modal yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian yang dimaksud. Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Sejak penandatanganan *General Agreement on Trade and Services* (GATS), Indonesia mulai meningkatkan transaksi ekspor. Dukungan Indonesia terhadap kelancaran perdagangan internasional, yaitu dengan meratifikasi konvensi *World Trade Organization* (WTO) pada tanggal 15 April 1994 yang implementasinya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO, maka

---

<sup>3</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia-Jilid 4: Hukum Jual Beli Perusahaan*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003), hal. perdagangan

pelaksanaan transaksi pembayaran ekspor impor di Indonesia merupakan hal yang tidak terpisahkan dari perdagangan global tersebut.

Manusia memiliki beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi, agar dapat menunjang kelangsungan hidupnya. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, manusia mengadakan hubungan dengan manusia lain yaitu dengan melakukan perdagangan. Perdagangan ialah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membeli dan menjual barang-barang yang memudahkan dalam memajukan pembelian dan penjualan itu<sup>4</sup>.

Menurut Hartono Hadisoeparto, pelaksanaan perdagangan di dalam negeri lebih mudah dilaksanakan dan tidak terdapat banyak hambatan jika dibandingkan dengan perdagangan internasional. Hambatan dalam perdagangan internasional antara lain disebabkan karena terpisahnya pembeli dan penjual secara geografis, adanya batas-batas kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan. Selain itu masing-masing negara memiliki peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara masing-masing, serta perbedaan mata uang yang berlaku di masing-masing negara tentu saja merupakan beberapa faktor penghambat perdagangan internasional<sup>5</sup>.

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini berkembang dengan pesat dan cepat. Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan

---

<sup>4</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 5

<sup>5</sup> Hartono Hadisoeparto, *Kredit Berdokumen (Letter Of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*, Yogyakarta, Liberty Offset, 1991, Hal. 2



berlangsung dengan cepat. Teknologi informasi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban umat manusia. Ekspor impor dewasa ini sering juga disebut sebagai bisnis dokumen atau bisnis surat berharga<sup>6</sup>.

Hal ini disebabkan realisasi suatu transaksi pada umumnya diwakili oleh dokumen-dokumen pengapalan seperti Bill of Lading, faktur perdagangan, draft, polis asuransi dan lainnya. Pengertian dari Letter of Credit itu sendiri adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan pada eksportir diluar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Bank penerbit L/C menjamin untuk mengakseptir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat tersebut. Segala ketentuan praktek dan kebiasaan kredit berdokumen terdapat didalam ketentuan yang dikenal sebagai The Uniform Customs and Practice for Documentary<sup>7</sup>.

Sebagaimana yang dikatakan H. M. N Purwosutjipto, bahwa dipandang dari sudut jual beli perusahaan, perbuatan ekspor impor adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup. Ekspor impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli diseberang lautan. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur

---

<sup>6</sup> Etty Susilowati Suhardo, Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri (Semarang: FH UNDIP, 2001), hal.

<sup>7</sup> Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 4.

pertama dari pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sedangkan unsur kedua adalah pembayaran.

Jual beli secara umum diatur KUHPerdata., sedangkan jual beli perdagangan tidak diatur dalam KUHPerdata maupun KUHD, melainkan berdasarkan perjanjian antara pihak-pihak, dan kebiasaan yang berlaku dalam Mengingat jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian, maka perjanjian jual beli tunduk pada Hukum Perjanjian pada umumnya. Batasan tentang perjanjian dalam Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>8</sup>

Sebagai ketentuan umum, KUHPerdata tetap berlaku terhadap jual beli perdagangan sepanjang tidak diperjanjikan secara khusus menyimpang. Bagi perkembangan perekonomian Indonesia, transaksi ekspor impor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting, karena dapat meningkatkan pencarian sumber-sumber devisa yang antara lain adalah meningkatkan transaksi-transaksi ekspor dan menekankan pengeluaran-pengeluaran devisa dengan cara membatasi aktivitas-aktivitas impor. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya dalam penelitian ini akan digunakan istilah UU

---

<sup>8</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia-Jilid 4: Hukum Jual Beli Perusahaan*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003), hal. perdagangan..

Perbankan), bahwa sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan modal yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian yang dimaksud. Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Sejak penandatanganan General Agreement on Trade and Services (GATS), Indonesia mulai meningkatkan transaksi ekspor. Dukungan Indonesia terhadap kelancaran perdagangan internasional, yaitu dengan meratifikasi konvensi World Trade Organization (WTO) pada tanggal 15 April 1994 yang implementasinya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO, maka pelaksanaan transaksi pembayaran ekspor impor di Indonesia merupakan hal yang tidak terpisahkan dari perdagangan global tersebut<sup>9</sup>.

Masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional. Bank sebagai suatu lembaga keuangan memberikan peranan penting dalam jasa-jasa pembayaran perdagangan internasional, seperti untuk transaksi pembayaran melalui internet banking atau melalui sistem The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Sistem SWIFT merupakan bagian dari internet banking. Secara obyektif, SWIFT mempertemukan data komunikasi dan memproses kebutuhan dari masyarakat keuangan global Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia memberikan pilihan kepada bank

---

<sup>9</sup> C.S.T Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia-Aspek Hukum Daiwa Ekonomi-bagian (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hal.

umum yang menerbitkan Letter of Credit (L/C) boleh tunduk . Kedua sistem ini memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia perbankan, karena mempercepat proses transaksi pembayaran internasional<sup>10</sup>.

Pembayaran melalui internet banking dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) lebih efisien dan efektif. Letter of Credit (L/C) dalam perdagangan internasional merupakan instrumen yang sangat penting. Letter of Credit (L/C) berperan sangat dominan sebagai alat pembayaran ekspor impor. Letter of Credit (L/C) sebagai suatu instrumen dalam perdagangan internasional diatur secara internasional oleh Kamar Dagang Internasional (International Chambers of Commerce). Peraturan ini dituangkan dalam The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (dalam penelitian ini akan disingkat menjadi UCPDC 600)<sup>11</sup>. atau tidak pada UCP2007 Revision, ICC Publication Nomor 600. Demikian juga di luar negeri, bank-bank komersial sudah menundukkan Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan pada UCPDC 600.

Transaksi L/C melalui internet banking, dalam prakteknya sangat membantu bagi kelancaran transaksi perbankan. Namun demikian transaksi tersebut juga dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum tersendiri, misalnya hukum apa (*Choice Of Law*) yang akan digunakan oleh para pihak jika terjadi sengketa, mengingat para pihak pada umumnya tinggal dalam

---

<sup>10</sup> Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 1.

<sup>11</sup> Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 58.

lingkup negara yang berbeda serta kekuatan pembuktian data melalui internet banking.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan praktik jual melalui internet banking menggunakan letter of credit yang masih banyak terjadi dikalangan masyarakat kota khususnya di Kota Tegal. Dengan demikian penulis melakukan penelitian dalam bentuk sebuah tulisan hukum yang berjudul: “Analisis Yuridis Pembayaran Melalui Internet Banking Dengan Menggunakan *Letter Of Credit* di Bank BRI Unit 3 Kota Tegal”.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pembayaran melalui internet banking dengan menggunakan *Letter of Credit* dalam perspektif KUH Perdata?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi bank pembayar dalam transaksi *Letter of Credit* melalui internet banking?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pembayaran melalui internet banking dengan menggunakan *Letter of Credit* dalam perspektif KUH Perdata
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi bank pembayar dalam transaksi *Letter of Credit* melalui internet banking

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum keperdataan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan memahami tentang pembayaran melalui internet banking dengan menggunakan Letter of Credit dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lainnya yang terkait di Indonesia. Penelitian ini juga sedapat mungkin dilakukan agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu peraturan yang baik adalah peraturan yang tidak saja memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagai suatu peraturan, tetapi menimbulkan rasa keadilan dan kepatutan yang dilaksanakan/ ditegakkan dalam kenyataannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAXA**

#### **A. Tinjauan Umum Transaksi Ekspor Impor**

##### **4. Pengertian Transaksi Ekspor Impor**

Ekspor dan impor merupakan aktivitas yang terdapat dalam perdagangan internasional, oleh karena itu dapat pula transaksi dalam perdagangan internasional dikatakan sebagai transaksi ekspor impor. Di mana transaksi ekspor impor merupakan transaksi perdagangan yang melintasi negara-negara yang berlainan dilihat dari sisi para pihak dalam transaksi tersebut.

Ekspor, dipandang dari sudut bahasa Indonesia adalah perbuatan mengirimkan barang ke luar Indonesia, sedang impor, sebaliknya, yaitu memasukkan barang dari luar negeri ke dalam Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 146/MPP/IV/99 tanggal 22 April 1999 tentang Ketentuan Umum di bidang Ekspor maka diperoleh pengertian ekspor, yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang-undang yang berlaku. Sedangkan pengertian impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan ekspor impor yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menurut Pasal 1 angka (13) UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, menyebutkan bahwa Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Sedangkan dalam angka (14) disebutkan definisi ekspor yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Menurut Agus Svarnha Nurpatricia:

Transaksi ekspor-impor adalah transaksi perdagangan internasional (*International Trade*) yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara yang berbeda.<sup>12</sup>

Menurut Etty Susilowati Suhardo yang dimaksud dengan transaksi perdagangan internasional adalah:

Suatu rangkaian kegiatan dalam suatu perdagangan yang lazim dikenal dengan perdagangan ekspor impor. Perdagangan ini merupakan suatu transaksi sederhana, yaitu membeli dan menjual barang antar pengusaha yang masing-masing bertempat tinggal di negara-negara yang berbeda.<sup>13</sup>

Menurut Amir M.S:

Perdagangan luar negeri berarti perdagangan barang dari suatu negeri ke lain negeri di luar batas negara.<sup>14</sup>

Agus Svarnha Nurpatricia, “Perdagangan Jual Beli Dengan Menggunakan L/C (*Letter of Credit*) Pada CV. Golden Teak Garden Semarang”, 2007, Hal. 12.

Etty Susilowati Suhardo, 2001, Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri, Semarang, FH UNDIP, hal. 2 sebagaimana dikutip oleh Agus Svarnha, Hal 24 Amir, M.S. Seluk Beluk dan Teknik

---

<sup>12</sup> Agus Svarnha Nurpatricia, “Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan L/C (*Letter of Credit*) Pada CV. Golden Teak Garden Semarang”, 2007, Hal. 12

<sup>13</sup> Etty Susilowati Suhardo, 2001, Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri, Semarang, FH UNDIP, hal. 2 sebagaimana dikutip oleh Agus Svarnha, Hal 1

<sup>14</sup> Amir, M.S. Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri, Seri Umum No.2, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1985, hal. 2.



Perdagangan Luar Negeri, Sen Umum No.2, PT. Pustaica Binaman Pressindo, Jakarta, 1985, hal. 2.

O.P. Simorangkir berpendapat bahwa perdagangan internasional adalah: Perdagangan yang dilaksanakan para pedagang antar negara yang berbeda, mengakibatkan timbulnya akan valuta asing yang mempengaruhi neraca perdagangan negara yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Melihat definisi-definisi mengenai perdagangan internasional yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi ekspor impor atau yang disebut juga dengan perdagangan internasional, pada hakikatnya adalah perjanjian jual beli antara penjual dengan pembeli yang terpisah satu sama lainnya baik secara geografis maupun oleh batas kenegaraan.<sup>16</sup>

Mengenai transaksi ekspor-impor ini tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata maupun dalam KUHDagang, akan tetapi secara umum ketentuan dalam KUHPerdata dalam Bab V Buku III tentang Jual Beli dan ketentuan dalam KUH Dagang tetap berlaku bagi perdagangan ekspor impor Indonesia.<sup>17</sup>

Mengingat jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian, maka perjanjian jual beli tunduk pada Hlukum Perjanjian pada umumnya. Batasan tentang perjanjian dalam Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan: 25Simorangkir, O.P. Kamus Perbankan, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 128. 26 Hartono Hadisoeparto, *Op. Cit*, Hal. 2. 27Agus Svarnha Nurpatia, *Op. Cit*, Hal. 14.

*“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

---

<sup>15</sup> Simorangkir, O.P. Kamus Perbankan, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 128

<sup>16</sup> Hartono Hadisoeparto, *Op.Cit*, Hal. 2.

<sup>17</sup> Agus Svarnha Nurpatia, *Op.Cit*, Hal. 14.

Ketentuan umum yang secara mutlak harus ditaati dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang hal.

Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian yang telah memenuhi syarat sah, mengakibatkan para pihak terikat. Disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang telah disepakati tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan definisi perjanjian jual beli secara umum, dimana disebutkan jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara penjual dengan pembeli, dengan nama pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga benda sebagai yang telah diperjanjikan.

## **5. Pihak-Pihak Dalam Transaksi Ekspor Impor**

Hubungan perdagangan luar negeri dalam hal ini ekspor impor sama halnya dengan perdagangan dalam negeri yaitu terdapat pembeli, penjual dan adanya transaksi jual beli. Hanya saja dalam ekspor impor, penjual disebut

sebagai eksportir dan pembeli disebut sebagai importir.<sup>18</sup> Selain eksportir dan importir, biasanya terdapat bank sebagai pihak ketiga yang berfungsi untuk menjamin terciptanya kelancaran perdagangan internasional oleh para pihak. Adapun dibutuhkan bank untuk menjamin kelancaran ekspor impor disini disebabkan wilayah atau domisili penjual dan pembeli melintas batas negara.

## 6. Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor Impor

Menurut Ramlan Ginting, pembayaran perdagangan internasional dapat dilakukan dengan cara:<sup>19</sup>

1. *Letter of Credit*
2. Non Letter of Credit
  - a. *Advance Payment;*
  - b. *Collection;*
  - c. *Open Account;*
  - d. *Consignment.*

Menurut Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, impor dan Lalu Lintas Devisa dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa cara pembayaran ekspor impor adalah dengan tunai atau

Agus Svarnha Nurpatria, *Op. Cit.* Hal. 15.

Ramlan Ginting, *Op. Cit.*, Hal. 13

dengan kredit. Kemudian dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut, dijelaskan bahwa cara pembayaran ekspor impor dapat dilakukan dengan:

- a. Pembayaran di muka (*Advance Payment*)

---

<sup>18</sup> Agus Svarnha Nurpatria, *Op.Cit*, Hal. 15.

<sup>19</sup> Ramlan Ginting, *Op.Cit*, Hal. 13.

- b. Wesel Inkaso dengan kondisi *Document Against Payment* (D/P) dan *Document Against Acceptance* (D/A)
- c. Perhitungan kemudian (*Open Account*)
- d. Konsinyasi (*Consignment*)
- e. *Letter of Credits* (L/C)
- f. Cara pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pembayaran di muka atau *Advance Payment* adalah pembayaran yang dilakukan importir kepada eksportir sebelum barang dikapalkan. Kesepakatan cara pembayaran ini dicantumkan dalam kontrak jual beli antara eksportir dengan importir. *Advance payment* dapat dilakukan melalui bank atau secara langsung kepada eksportir.<sup>20</sup>

Cara pembayaran berikutnya adalah Wesel Inkaso yakni cara pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan wesel dimana eksportir adalah sebagai penarik wesel (*drawer*) yang memerintahkan kepada Importir sebagai si tertarik (*drawee*) untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang ditentukan dalam wesel itu.<sup>21</sup>

Adapun yang dimaksud dengan D/P atau *Documents Against Payment* ialah eksportir memerintahkan *remitting bank* untuk menyerahkan dokumen-dokumen ekspor langsung kepada importir atau melalui banknya apabila dia sudah membayar, hal ini bisa dilakukan jika kesepakatan pembayarannya adalah *sight* atau unjuk. Dokumen yang dikirim terdiri dari *financial documents* (*sight drafts* atau wesel unjuk) dan *shipping documents*.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ramlan Ginting, *Ibid.*, Hal. 14.

<sup>21</sup> Roselyne Hutabarat, *Op. Cit.* Hal. 11-12.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hal. 11

Selanjutnya yang dimaksud dengan D/A atau *Documents Against Acceptance* ialah eksportir meminta kepada *remitting bank* agar mengirimkan dokumen dan memberikan perintah kepada *collecting* atau *presenting bank* untuk menyerahkan dokumen kepada importir setelah importir melakukan akseptasi *drafts* (berjanji akan membayar pada saat jatuh waktu).<sup>23</sup>

Pembayaran dengan menggunakan perhitungan kemudian atau *open account* adalah pengiriman dan penagihan dokumen keuangan oleh eksportir kepada importir dengan menggunakan jasa bank. Dalam *open account*, eksportir dan importir sepakat bahwa penyelesaian pembayaran jual beli di antara keduanya akan diperhitungkan dalam pembukuan masing-masing atau importir akan melunasi pembayaran pada tanggal yang disepakati.<sup>24</sup>

Cara pembayaran dengan konsinyasi atau *consignment* adalah pengiriman barang yang belum terjual ke luar negeri. Barang hanya dititipkan oleh eksportir kepada importir di luar negeri untuk dijual kepada pihak lainnya. Pembayaran harga barang oleh importir kepada eksportir dilakukan setelah barang terjual.<sup>25</sup>

Cara pembayaran dengan menggunakan L/C tidak lepas dari adanya syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan. Salah satu dari persyaratan itu adalah bahwa pembayaran baru dapat dilaksanakan apabila telah diserahkan dokumen-dokumen yang secara formal telah memenuhi syarat yang ditetapkan L/C itu kepada bank. Pembayaran dengan L/C dalam pelaksanaannya melibatkan jasa perbankan yang masing-masing berada di negara berlainan. Oleh karena itu penggunaan cara pembayaran dengan L/C

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hal. 11

<sup>24</sup> Ramlan Ginting, *Op.Cit.*, Hal. 16

<sup>25</sup> Ramlan Ginting, *Loc.Cit.*

membutuhkan kesesuaian cara pembayaran antara bank-bank tersebut, yang diwujudkan dengan adanya keseragaman peraturan.<sup>26</sup>

## B. Tinjauan Umum *Letter of Credit* (L/C)

### 8. Pengertian *Letter of Credit* (L/C)

Amir M.S.:

*Letter of credit* adalah suatu surat yang dikeluarkan bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima L/C diberi hak oleh importir importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) atas Bank Pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi syarat yang tercantum di dalam surat itu.<sup>27</sup>

Kasmir:

*Letter of Credit* (L/C) adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri (antar pulau) atau arus barang ke luar negeri (ekspor-impor). Kegunaan *Letter of Credit* adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (importir) maupun penjual (ekportir) dalam transaksi perdagangan. Dengan kata lain L/C menjamin kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara eksportir dengan importir melalui itikad baik kedua belah pihak.<sup>28</sup>

Ec Warsidi:

L/C merupakan setiap jenis kesepakatan atau komitmen atau janji dan *issuing bank* yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak untuk melakukan pembayaran kepada *beneficiary* apabila menerima dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.<sup>29</sup>

John F. Dolan:

L/C adalah perbuatan yang sesungguhnya dilakukan salah satu pihak (penerbit) untuk mengganti kekuatan finansialnya untuk pihak lainnya (*the*

---

<sup>26</sup> Adrian Sutedi, *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*, Bandung, Alfabeta, Hal. 6.

<sup>27</sup> Amir. M. S., 2005, *Letter of Credit; Dengan Pembahasan Khusus Standby L/C Dalam Bisnis Impor*, Jakarta, Penerbit PPM, hal. 1.

<sup>28</sup> Kasmir, *Op. Cit*, hal. 186.

<sup>29</sup> Ec Warsidi, *Op.Cit.*, Hal. 12

*account party*) dengan mana perbuatan itu mensyaratkan penyerahan sebuah wesel atau tuntutan pembayaran dan, yang paling sering, dokumen-dokumen lainnya.<sup>30</sup>

C.F.G. Sunaryati Hartono:

Secara harfiah L/C dapat diterjemahkan sebagai Surat Utang atau Surat Piutang atau Surat Tagihan, tetapi sebenarnya L/C lebih merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila dan setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>31</sup>

Gunarto Suhardi:

Perjanjian atau pernyataan sepihak dan *issuing bank* kepada bank korespondennya atau bank lainnya yang ditunjuk oleh bank koresponden tersebut bahwa bila eksportir telah mengapalkan barangnya kepada importir dan semuanya dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam L/C tersebut, maka *issuing bank* akan membayarkan *proceeds* dari L/C tersebut kepada *beneficiary*, yakni orang yang berhak menerima pembayaran.<sup>32</sup>

Definisi L/C menurut Black's Law Dictionary adalah sebuah instrumen oleh penerbit (biasanya sebuah bank), atas permintaan nasabahnya, menyetujui untuk menjamin sebuah wesel atau permintaan lainnya untuk pembayaran kepada pihak ketiga (*beneficiary*) sepanjang wesel atau permintaan tersebut sudah memenuhi dengan persyaratan yang diminta, dan tidak memandang apakah ada perjanjian yang mendasarinya antara Si nasabah dan *beneficiary* itu sudah terpenuhi.<sup>33</sup>

## 2. Klasifikasi *Letter of Credit* (L/C)

L/C berdasarkan fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi L/C sebagai alat pembayaran dan L/C sebagai alat penjaminan. Sebagai alat pembayaran, L/C memberi rasa aman kepada penerima, sedangkan sebagai alat penjamin,

---

<sup>30</sup> John F. Dolan, *Op.Cit.*, hal. 2-4.

<sup>31</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono sebagaimana dikutip oleh Ramlan Ginting, *Op. Cit*, hal. 15.

<sup>32</sup> Gunarto Suhardi sebagaimana dikutip oleh kamushukum.com, 2003, *Letter of Credit atau LV* (online), tersedia di website <http://kamushukum.com/en/letter-of-credit-atau-lc/>, diakses tanggal 16 November 2010 pukul 20.29 WIB.

<sup>33</sup> Black's Law Dictionary, Eight Edition, 2004, USA, West-Thomson, hal. 923.

L/C memberi rasa aman kepada pihak terjamin.<sup>34</sup> L/C sebagai alat pembayaran dapat dilaksanakan jika semua dokumen yang diminta L/C telah dipenuhi penerima. Sebaliknya L/C sebagai alat penjaminan dapat dilaksanakan jika pelaksanaan kontrak dasar yang dijamin L/C tidak dapat dilakukan pihak yang dijamin.

## 2.1. L/C Sebagai Alat Pembayaran

Pada umumnya L/C sebagai alat pembayaran diatur di dalam UCP, tetapi pengaturannya tidak terperinci. Oleh karena itu pengaturan UCP tersebut harus dipadukan dengan konsepsi yang berkembang dalam transaksi perbankan internasional baik yang berasal dari rumusan para pakar L/C, putusan pengadilan mengenai L/C maupun kebiasaan dan praktik L/C. L/C sebagai Alat Pembayaran terdiri dari beberapa jenis yang sebagian diatur dalam UCP dan sebagian lagi dirumuskan oleh doktrin.

### 2.1.1 L/C dalam UCP

#### a. *Sight Payment* L/C

*Sight Payment* L/C adalah L/C yang pembayarannya secara tunai. Syarat pembayaran L/C ini menggunakan cara penyerahan dokumen atau wesel kepada *issuing bank*. Jika bank penerbit menerbitkan *sight payment J/C*, maka bank penerus diinstruksikan untuk melakukan pembayaran atau mengatur pembayaran kepada penerima pada saat pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C.

Cara pembayaran L/C yang demikian dinamakan pembayaran berdasarkan dokumen-dokumen (*payment against*

---

<sup>34</sup> Ramlan Ginting, *Op. Cit*, hal. 31



*documents*). Jika wesel unjuk ditarik dalam rangka *sight payment LIC*, maka fungsi wesel hanya sebagai tanda terima pembayaran. Rolf Eberth dan E.P. Ellinger mengatakan dalam *sight payment L/C* janji pembayaran dari bank penerbit ditujukan semata-mata kepada penerima.<sup>35</sup>

b. *Acceptance L/C*

*Acceptance L/C* yang dikenal juga dengan *L/C berjangka* adalah *L/C* yang pembayarannya dilakukan dalam suatu jangka waktu tertentu setelah wesel ditunjukkan atau setelah barang dikapalkan. *Acceptance L/C* merupakan pemberian kredit kepada pembeli oleh penjual, karena pembeli yang berada di luar negeri akan menerima barang-barang tanpa melakukan pembayaran pada saat yang sama melainkan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam *L/C*.

Dalam *acceptance L/C*, *L/C* dibayar pada saat pembayaran jatuh tempo, tidak pada saat pengajuan dokumen-dokumen. Akseptasi dilakukan atas wesel berjangka yang ditarik oleh penerima. Akseptasi atas wesel berjangka berarti jaminan pembayaran pada saat jatuh tempo. Wesel berjangka yang sudah diaksep bersifat dapat dipindahtangankan. Melalui akseptasi penerima memperoleh janji tanpa syarat (*unconditional commitment*) dan bank untuk membayar pada saat wesel berjangka jatuh tempo. Terhadap wesel berjangka

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 37

yang sudah diaksep dapat dijual kepada bank dengan cara diskonto.<sup>36</sup>

c. *Revocable L/C*

Y. Sri Susilo dkk menyatakan bahwa *revocable L/C* ialah L/C yang dapat dibatalkan atau diubah oleh bank penerbit setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang menerima pembayaran.<sup>37</sup> *Revocable* artinya “*Term and Condition*” di dalam L/C telah diterbitkan dapat diubah sewaktu-waktu oleh bank penerbit (atas permintaan pembeli) tanpa meminta persetujuan dari pihak bank penerbit maupun penjual.<sup>38</sup>

Menurut UCP *revocable L/C* adalah L/C yang dapat diubah atau dibatalkan oleh bank penerbit setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penerima.<sup>39</sup> Dalam hal ini kedudukan penerima lemah, sebab ia menanggung risiko yang tidak ringan. Hal ini antara lain karena sifatnya, maka L/C tersebut tiba-tiba dibatalkan atau diubah oleh penerbit. Akan tetapi menurut UCP bank penerbit harus melakukan pembayaran kembali kepada bank yang ditunjuk yang telah melakukan pembayaran L/C kepada penerima atas dasar dokumen-dokumen yang diajukan yang sesuai dengan persyaratan L/C dan tidak menerima pemberitahuan perubahan dari pembatalan L/C sebelum dilakukan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Hal. 38

<sup>37</sup> Y. Sri Susilo, “Bank dan Lembaga Keuangan Lain”, dalam Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, Hal.

<sup>38</sup> Adrian Sutedi, *Loc.Cit.*

<sup>39</sup> Ramlan Ginting, *Op.Cit*, Hal. 34.

pembayaran dimaksud. Dalam hal ini penerima tetap berhak menerima pembayaran dari penerbit, yang dapat dilakukan dengan menggunakan cara pembayaran secara unjuk (*sight payment*), akseptasi (*acceptance*), negosiasi (*negotiation*), dan pembayaran kemudian (*deffered payment*).

d. *Irrevocable L/C*

UCP menyebutkan istilah *irrevocable L/C* tanpa memberikan uraian lebih lanjut. Namun demikian, karena *irrevocable L/C* merupakan lawan dari *revocable LIC*, maka pengertian *irrevocable L/C* dapat dimengerti secara implisit sebagai L/C yang perubahan atau pembatalannya harus dengan persetujuan penerima.<sup>40</sup>

Adrian Sutedi:

*Irrevocable L/C* adalah suatu L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak baik pembeli, penjual, maupun pihak bank yang bersangkutan. Selama jangka waktu berlakunya yang ditentukan dalam L/C, *issuing bank* tetap menjamin untuk membayar, mengaksep, atau menegosiasi wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut asalkan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan di dalamnya terpenuhi.

*Irrevocable* artinya *Term and Condition* di dalam L/C yang telah diterbitkan hanya boleh diubah atas kesepakatan *beneficiary (seller)* dengan buyer. L/C jenis ini tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari

---

<sup>40</sup> Ramlan Ginting, *Ibid*, Hal. 84

pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi L/C yaitu penerima dan bank penerbit.<sup>41</sup>

e. *Negotiation L/C*

*Negotiation L/C* adalah L/C yang pembayarannya dengan cara membeli wesel dan / atau dokumen-dokumen yang diajukan penerima.<sup>42</sup> Jika negosiasi dilakukan oleh bank penerbit atau bank pengkonfirmasi selalu tanpa disertai hak regres (*without recourse*) terhadap penerima, sedangkan negosiasi oleh bank lainnya selalu dengan hak regres (*with recourse*) terhadap penerima. Negosiasi dapat dilakukan atas wesel unjuk dan wesel berjangka. Tujuan negosiasi adalah untuk memberi kesempatan kepada bank untuk menegosiasi (membeli) wesel dan / atau dokumen-dokumen dari penerima dan kemudian mengajukannya kepada bank penerbit untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan persyaratan L/C.

f. *Deferred Payment L/C*

*Deferred Payment L/C* adalah L/C yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari. Dalam L/C jenis ini tidak termasuk wesel sebagai dokumen yang diajukan dalam rangka pembayaran L/C. Penerima merasa aman akan mendapat pembayaran pada waktu yang ditentukan karena ada jaminan dari bank penerbit. Untuk mengamankan bank penerbit dari risiko kerugian akibat penyerahan dokumen-

---

<sup>41</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, Hal. 16.

<sup>42</sup> Ramlan Ginting, *Op.Cit.*, Hal. 92

dokumen dimaksud, maka penyerahan dokumen-dokumen dapat disertai dengan penggunaan instrument *trust receipt*.<sup>43</sup>

Dalam pelaksanaan *trust receipt* bank melepas *bill of lading* kepada pemohon atas jaminan pemohon bahwa setelah mengambil alih kepemilikan barang pemohon menguasai barang tersebut sebagai pihak kepercayaan bank dan akan menjual barang dimaksud atas nama bank. Pemohon menjamin untuk menguasai hasil penjualan barang berdasarkan kepercayaan dan akan menyampaikannya kepada bank sebesar minimal sama dengan fasilitas bank yang digunakan pemohon. Dalam *trust receipt* dimuat persyaratan lain untuk kepentingan bank misalnya pemohon dipersyaratkan untuk menguasai barang dan uang hasil penjualan barang tersebut terpisah dari barang dan uang lainnya dan barang wajib diasuransikan.<sup>44</sup>

g. *Confirmed L/C*

Menurut Adrian Sutedi, *Confirmed L/C* adalah suatu bentuk L/C dimana *issuing bank* meminta dan memberi kuasa kepada bank koresponden yang ditunjuk untuk mengadvikan juga mengkonfirmasi (menjamin) L/C dengan menambahkan pengikatan dirinya ikut menjamin pembayaran atas beban *issuing bank* kepada *beneficiary*.

Jika L/C dikonfirmasi oleh bank pengkonfirmasi maka tanggung jawab bank pengkonfirmasi sama dengan tanggung

---

<sup>43</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, Hal. 32

<sup>44</sup> Ramlan Ginting, *Op. Cit.*, Hal. 98

jawab bank penerbit.<sup>45</sup> Bank pengkonfirmasi yang mengkonfirmasi L/C, menjamin kewajiban bank penerbit dengan menyatakan komitmennya sendiri untuk membayar L/C. Bank pengkonfirmasi tidak dapat menarik diri dan kewajibannya kepada penerima. Bank pengkonfirmasi dan bank penerbit sama-sama memberikan kepastian pembayaran L/C. Dalam *Confirmed* L/C tercipta kepastian pembayaran ganda.

Dalam *confirmed* L/C, bank pengkonfirmasi tidak memiliki hak regres (*right of recourse*) terhadap penerima, walaupun cara pembayaran L/C atas dasar negosiasi.<sup>46</sup> Bank pengkonfirmasi baru memiliki hak regres, jika bank pengkonfirmasi melakukan pembayaran kepada penerima dengan *under reserve* atau dengan penandatanganan *letter of indemnity* oleh penerima.<sup>5747</sup>

Pembayaran dengan *under reserve* dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang memuat *discrepancy*. Bank pengkonfirmasi yang melakukan pembayaran atas dokumen-dokumen yang *discrepancy* berdasarkan kondisi *under reserve* berhak menagih kembali nilai yang dibayarkannya kepada penerima jika bank pengkonfirmasi tidak memperoleh pembayaran kembali dan bank penerbit atau *reimbursing bank*. Pembayaran dengan penandatanganan *letter of*

---

<sup>45</sup> Goh Tianwah, 1992, *Guide to Letter of Credit*, sebagaimana dikutip oleh Ramlan Ginting, *ibid*, Hal. 99

<sup>46</sup> *Ibid*, Hal. 100

<sup>47</sup> Ramlan Ginting, *Loc. Cit*

*indemnity* sama dengan pembayaran dengan kondisi under reserve. Bedanya, letter of indemnity ditujukan kepada nasabah pada umumnya, sedangkan under reserve ditujukan kepada nasabah inti. Pada letter of indemnity nasabah menandatangani pernyataan bersedia membayar kembali kepada bank pengkonfirmasi, sedangkan pada under reserve, janji membayar kembali pada dasarnya dilakukan secara lisan saja.<sup>48</sup>

#### h. *Transferable L/C*

Menurut Adrian Sutedi, yang dimaksud dengan *Transferable L/C* adalah

Suatu kredit yang memberikan hak kepada *beneficiary* untuk meminta kepada bank yang diamanatkan untuk melakukan pembayaran atau akseptasi atau kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi, untuk menyerahkan hak atas kredit itu seluruhnya atau sebagian kepada satu pihak ketiga atau lebih. Sehingga transferable L/C adalah L/C yang dapat dialihkan.<sup>49</sup>

UCP 500 atau UCP 600 mengatur relatif rinci L/C yang dapat dialihkan (transferable L/C). UCP 500 atau UCP 600 mengatur bahwa L/C dapat dialihkan oleh penerima kepada pemasok melalui perantara bank jika bank penerbit menyatakan demikian dalam L/C. Pengalihan ini hanya dapat dilakukan satu kali proses kecuali L/C menentukan sebaliknya. Pengalihan dapat dilakukan terhadap sebagian

---

<sup>48</sup> Ramlan Ginting, *Ibid*, Hal. 100-101.

<sup>49</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, Hal. 32.

atau keseluruhan L/C dan dapat dialihkan kepada satu atau lebih pemasok.<sup>50</sup>

i. Assignment LIC

UCP 500 atau UCP 600 mengatur *Assignment* L/C yaitu L/C yang membolehkan pengalihan hasil pembayaran atas L/C kepada pihak lain atas permintaan penerima. Terlepas dari L/C merupakan transferable L/C atau bukan, hak atas pembayaran L/C dapat diserahkan kepada pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>51</sup>

Dengan dapat dialihkannya hasil pembayaran L/C (*proceeds*) juga tidak berarti L/C merupakan surat berharga yang bersifat *negotiable instrument*. L/C sebagai alat pembayaran tetap tidak dapat dialihkan. Dalam hal ini yang dialihkan adalah hasil pembayaran L/C. penerima selaku penjual berhak mengalihkan hasil pembayaran L/C yang menjadi miliknya kepada pihak ketiga.<sup>52</sup>

## 2.1.2 L/C yang dirumuskan doktrin

a. Back to Back L/C

Back to Back L/C adalah suatu L/C yang dibuka atas permintaan *applicant* dengan jaminan L/C lain yang serupa yang mana *applicant* tersebut sebagai *beneficiary*.<sup>53</sup> *Back to Back L/C* sering disebut sebagai Transaksi L/C anak.

---

<sup>50</sup> Ramlan Ginting, *Op.Cit.*, Hal. 103

<sup>51</sup> *Ibid*, Hal. 106.

<sup>52</sup> Ramlan Ginting, *Op.Cit.*, Hal. 114

<sup>53</sup> Ec. Warsidi, *Op. Cit*, hal. 114



Transaksi L/C anak (*back to back L/C*) melibatkan satu L/C sebagai pelindung atau pengamanan untuk L/C lain yang dinamakan L/C anak.<sup>54</sup>

Kedua L/C tersebut berdasarkan hukum L/C masing-masing berdiri sendiri, tetapi persyaratannya sama kecuali untuk nilai L/C dan tanggal jatuh tempo L/C. L/C sebagai jaminan yang disebut juga L/C induk (master L/C) nilainya relatif lebih besar dibanding nilai L/C anak. Tanggal jatuh tempo L/C induk lebih lama dibanding tanggal jatuh tempo L/C anak.<sup>55</sup>

Jenis L/C ini lebih banyak digunakan jika kredit yang ditransfer tidak dapat digunakan karena berbagai alasan. Misalnya adanya perbedaan dalam nilai mata uang pembelian dan nilai mata uang penjualan barang. Dan dokumen-dokumen pengapalan barang yang harus diubah atau diganti.<sup>56</sup>

Sebenarnya *back to back L/C* ini bukan merupakan jenis L/C, tetapi hanya suatu sistem di mana suatu penerbitan L/C yang dijamin oleh L/C lain yang serupa. Jadi dapat dikatakan suatu L/C dijamin atau *diback up* dengan L/C sehingga sistem ini disebut dengan *back to back L/C*.<sup>57</sup>

b. *Red Clause L/C*

*Red Clause L/C* adalah suatu klausula yang memuat makna anti *cipatory* yaitu menyangkut sesuatu hal yang

---

<sup>54</sup> Ramlan Ginting, *Op.Cit.*, Hal. 107

<sup>55</sup> Ramlan Ginting, *Loc.Cit*

<sup>56</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, Hal. 20

<sup>57</sup> Ec Warsidi, *Op. Cit.*, Hal. 114

sifatnya didahulukan. Adapun yang didahulukan di sini adalah pembayaran atas L/C oleh bank yang dilakukan sebelum dokumen-dokumen yang disyaratkan diserahkan. Inilah yang menyebabkan *Red Clause L/C* digolongkan sebagai *anticipatory credit*.<sup>58</sup>

Fasilitas pembayaran di muka diberikan kepada penerima tanpa disertai dengan pengajuan dokumen-dokumen kepada bank pembayar pada saat menerima pembayaran di muka. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan diproses dan disampaikan kepada bank pembayar sama halnya dengan dalam L/C pada umumnya. Dokumen-dokumen diajukan kepada bank pembayar setelah dilakukan pengiriman barang oleh penerima.<sup>59</sup>

Adapun informasi yang diperlukan dan diterima pada saat penerimaan pembayaran di muka oleh penerima adalah bukti keberadaan, produksi dan penyimpanan barang yang akan dikapalkan. Hal tersebut merupakan dokumen yang berbeda dengan bukti pengiriman barang yang merupakan dokumen-dokumen yang diajukan dalam rangka pembayaran L/C pada umumnya.<sup>60</sup>

c. *Revolving L/C*

*Revolving L/C* adalah L/C yang jumlahnya akan menjadi seperti semula dengan persyaratan yang sama tanpa

---

<sup>58</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, Hal. 25

<sup>59</sup> Ramlan Ginting, *Op. Cit.*, Hal. 109

<sup>60</sup> Ramlan Ginting, *Loc. Cit.*

membuka L/C baru setelah satu pembayaran terjadi dalam suatu periode waktu.<sup>61</sup>

Revolving L/C merupakan L/C yang dipakai berulang-ulang oleh penerima dalam jumlah tertentu selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam L/C yang bersangkutan tanpa perlu menerbitkan L/C yang baru atau melakukan perubahan L/C yang bersangkutan.<sup>62</sup>

Revolving L/C diterbitkan kepada penerima untuk kegiatan bisnis yang berkesinambungan dengan pemohon. Segera setelah dilakukan pembayaran kembali atas penarikan L/C, nilai L/C kembali tersedia kepada penerima sebesar nilai semula.<sup>63</sup> *Revolving* L/C dapat bersifat kumulatif atau non-kumulatif. *Revolving* L/C berlaku selama periode tertentu dan meng-cover wesel-wesel dari semua transaksi selama periode tersebut. *Revolving* L/C pada umumnya bersifat *revocable* agar dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh bank penerbit jika wesel yang telah dinegosiasi tidak dibayar kembali oleh pemohon.

## 2.2. L/C Sebagai Alat Penjaminan

### a. *Standby* L/C

*Standby* L/C merupakan salah satu jenis L/C yang diterbitkan oleh *issuing bank* atas permintaan dari *applicant* untuk menjamin

---

<sup>61</sup> Ec Warsidi, *Op. Cit.*, Hal. 120.

<sup>62</sup> Pilecki sebagaimana dikutip oleh Ramlan Ginting, *Op. Cit.*, Hal. 111.

<sup>63</sup> Sarna sebagaimana dikutip oleh Ramlan Ginting, *Ibid*, hal. 111-112.

suatu pembayaran kepada beneficiary, apabila applicant wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya.<sup>64</sup>

*Standby L/C* dikembangkan oleh perbankan di Amerika setelah Perang Dunia II. *Standby L/C* merupakan instrumen yang memungkinkan bank-bank domestik Amerika untuk bersaing dengan bank asing dalam melaksanakan transaksi bisnis internasional.<sup>65</sup>

*Standby L/C* harus memuat persyaratan minimal yaitu bersifat tidak dapat diubah atau dibatalkan, keterikatan bank penerbit untuk membayar atas pengajuan keterangan atau pernyataan yang menyatakan wanprestasi, tanggal jatuh tempo masa berlaku dan pernyataan tunduk pada UCP.<sup>66</sup> *Standby L/C* merupakan instrumen yang mencerminkan *inherent reliability, convenience, dan flexibility*.<sup>67</sup>

Hakikat *Standby L/C* adalah bahwa bank penerbit bersiap-siap untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal pemohon wanprestasi. *Standby L/C* dapat digunakan untuk menjamin pembayaran kembali kepada *obligee* jika *obligor* gagal melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak. Dalam *Standby L/C* *obligee* adalah penerima dan *obligor* adalah pemohon.<sup>68</sup>

*Standby L/C* mengambil alih bentuk hukum dan *L/C* dan juga tunduk pada ketentuan dasar yang sama yaitu UCP. Namun, sejak tanggal 1 Januari 1999 *Standby L/C* dapat juga tunduk pada

---

<sup>64</sup> Ec Warsidi, *Op. Cit.*, Hal. 133.

<sup>65</sup> E.P. Ellinger, sebagaimana dikutip oleh Ramlan Ginting, *Op. Cit.*, Hal. 114

<sup>66</sup> E.P. Ellinger, 1978, *Standby Letter of Credit*, sebagaimana dikutip oleh Ramlan Ginting, *Loc. Cit.*

<sup>67</sup> Wunnicke, sebagaimana dikutip oleh Ramlan Ginting, *Loc. Cit.*

<sup>68</sup> *Ibid.*, Hal. 115.

*International Standby Practices* (ISP 98) yang juga diterbitkan oleh ICC.<sup>69</sup>

b. Demand Guarantee

*Demand Guarantee* adalah jaminan yang dibayar berdasarkan pengajuan dokumen-dokumen tertentu kepada bank. Demand Guarantee adalah jaminan tanpa syarat.<sup>70</sup> Pembayaran Demand Guarantee tidak tergantung pada kemampuan penerima untuk menentukan wanprestasi atas kontrak dasar, tetapi pembayaran dilakukan atas dasar pengajuan klaim dilengkapi dengan persyaratan formal dari *demand guarantee* tersebut.<sup>71</sup>

### 3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam *Letter of Credit* (L/C)

#### 3.1. *Applicant*

Menurut Amir M.S. yang dimaksud dengan *Opener* atau *Applicant* ialah importir yang meminta bantuan bank devisanya untuk membuka L/C guna keperluan penjual atau eksportir.<sup>8272</sup>

*Applicant* adalah pihak yang meminta kepada bank supaya bank mau membuka L/C atas nama dirinya. Dalam hal ini, importir adalah pihak yang mendatangkan barang, atau mengimpor barang atau pihak yang membeli barang. Di dalam L/C, namanya bukan hanya *applicant* tetapi ada beberapa nama. Antara lain, *principal*, *buyer accountee* dan *accreditor*.<sup>73</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, Hal. 117-118.

<sup>70</sup> Raymond Jack, sebagaimana dikutip oleh Ramlan Ginting, *Ibid*, Hal. 121

<sup>71</sup> Rowe, *Guarantee: Standby Letters of Credit and Other Securities*, sebagaimana dikutip oleh Ramlan Ginting, *Loc. Cit.*

<sup>72</sup> Amir M.S., *Op.Cit.*, Hal. 3

<sup>73</sup> Ec Warsidi, *Op.Cit.*, Hal. 24

Perlu digarisbawahi dalam hal ini, hanya applicant saja yang sudah mempunyai fasilitas pembukaan L/C di *issuing* bank saja yang bisa mengajukan aplikasi pembukaan L/C ke *issuing* bank. Atas dasar aplikasi L/C dan applicant tersebut, *issuing* bank menerbitkan L/C yang diteruskan ke *advising bank* untuk diteruskan kepada *beneficiary*.<sup>74</sup>

### 3.2. *Issuing Bank*

Bank Pembuka L/C ini dalam bahasa asingnya dikenal dengan *The Opening Bank* atau *The Issuing Bank*. Bank ini melakukan pembukaan kredit setelah adanya permohonan pengajuan pembukaan kredit setelah adanya permohonan pengajuan pembukaan L/C dan pemohon kredit yaitu pembeli.<sup>75</sup>

Menurut Amir M.S., *issuing bank* adalah

Bank devisa yang dimintai bantuannya oleh importir untuk suatu L/C untuk keperluan eksportir. Bank devisa inilah yang memberikan jaminan kepada eksportir. Oleh karena itu, “nilai” L/C sangat bergantung pada nama baik dan reputasi dan bank devisa yang membuka L/C tersebut.<sup>76</sup>

Nama lain dan *issuing bank* adalah *opening bank*. *Issuing bank* merupakan bank di mana *applicant* menjadi nasabahnya, yaitu bank yang menjamin pembayaran kepada *beneficiary* atau kepada *nominated bank* atau kepada *confirming bank* (jika ada). Setelah itu, *issuing bank* akan menerbitkan L/C yang ditujukan kepada *beneficiary* berdasarkan adanya aplikasi L/C dan applicant. L/C akan diterbitkan apabila semua persyaratan pembukaan L/C telah dipenuhi oleh *applicant*.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Ec Warsidi, *Loc. Cit*

<sup>75</sup> Hartono Hadisoeparto, *Op. Cit.*, Hal. 28

<sup>76</sup> Amir M.S., *Op. Cit*, hal. 3

<sup>77</sup> Ec Warsidi, *Op. Cit.*, Hal. 24

### 3.3. *Advising Bank*

*Advising bank* adalah bank yang diminta oleh *issuing bank* untuk mengadvise/menampaikan L/C, baik langsung kepada beneficiary atau melalui banknya beneficiary, sementara nama lain dan *advising bank* adalah *notifying bank*.<sup>78</sup>

Setelah *The Opening Bank* membuka L/C, maka bank tersebut meneruskannya kepada kantor cabang atau salah satu dan koresponden banknya di negara eksportir.<sup>79</sup> Bank korespondensi ini berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung dalam L/C kepada eksportir yang berhak. Oleh karena itu bank korespondensi yang bersangkutan disebut *Advising Bank*. *Advising bank* sering juga disebut sebagai bank penyampai amanat.<sup>80</sup>

Bank Penerus ini sering disebut *The Advising Bank*, atau juga disebut dengan *Negotiation Bank* apabila *The Advising Bank* ini dikuasakan untuk membeli wesel-wesel yang ditarik oleh eksportir atas L/C tersebut.<sup>81</sup>

### 3.4. *Nominated Bank*

*Nominated bank* menurut Artikel 2 UCP 600 adalah bank di mana kredit tersedia atau setiap bank dalam hal kredit tersedia pada setiap bank. Menurut Ec Warsidi, *nominated bank* adalah

Pihak bank yang diberi kuasa oleh *issuing bank* untuk melakukan tiga hal. Yaitu, membayar secara sight bila L/C tersebut adalah *available by sight payment*, dan ia disebut sebagai “*paying bank*”. Kedua, melakukan DPU (*deffered payment undertaking*) atau menjamin pembayaran dan membayarnya pada saat jatuh tempo bila L/C tersebut adalah *available by deffered*

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hal. 25

<sup>79</sup> Hartono Hadisoeparto, *Op.Cit.*, Hal. 28

<sup>80</sup> Amir M.S., sebagaimana dikutip oleh Agus Svarnha, *Op.Cit*, hal. 48-49.

<sup>81</sup> Hartono Hadisoeparto, *Op.Cit.*, Hal. 28.

*payment*. Ia juga disebut “*paying bank*”. Ketiga, mengakseptasi drafts dan membayar pada saat jatuh tempo bila L/C adalah *available by acceptance*. Di sini, ia disebut sebagai *accepting bank*. Keempat, melakukan negosiasi bila L/C adalah *available by negotiation*, dan ia disebut sebagai *negotiating bank*.<sup>82</sup>

Apabila nominated bank tidak merangkap sebagai *confirming bank*, penunjukan dirinya sebagai *nominated bank* tidak akan menyebabkan ia berkewajiban untuk membayar atau menegosiasi atas *complying document* yang diterimanya. Terkecuali, ada kesepakatan tersendiri antara nominated bank dengan beneficiary. Hal ini akan sangat tergantung hubungan baik antara nominated bank dengan beneficiary. Dengan memberi kuasa kepada nominated bank untuk mengaksep drafts atau melakukan DPU, issuing bank otomatis memberi kuasa kepada bank-bank tersebut untuk mengambil alih *drafts* atau membayari lebih dahulu DPU yang dilakukan, sementara issuing bank berkewajiban untuk melakukan *reimburse* atas *nominated bank* tersebut.<sup>83</sup>

### 3.5. Confirming Bank

Menurut Hartono Hadisoeparto, *confirming bank* ialah bank kedua selain bank pembuka atau *issuing bank* yang ikut serta menjamin pembayaran L/C atau menjamin adanya pembayaran wesel yang diterbitkan atas L/C yang bersangkutan.<sup>84</sup>

*Confirming Bank* adalah bank yang ikut menjamin atas L/C yang diterbitkan oleh *issuing bank*. *Confirming Bank* akan mengkonfirmasi L/C yang diterbitkan *issuing bank* jika *issuing bank* sudah mempunyai fasilitas *confirm di confirming bank*.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Ec Warsidi, *Op.Cit.*, Hal. 27.

<sup>83</sup> Ec Warsidi, *Loc.Cit.*

<sup>84</sup> Hartono Hadisoparto, *Op.Cit.*, Hal. 29

<sup>85</sup> Ec Warsidi, *Pl/ Cot.*, Hal. 27



### 3.6. *Beneficiary*

*Beneficiary* adalah eksportir, yaitu pihak yang mengirimkan barang, atau mengeksport barang atau pihak yang menjual barang kepada importer. Dengan begitu, *beneficiary* ialah pihak yang mempunyai tagihan kepada penerbit L/C.<sup>86</sup>

Oleh karena itu, apabila L/C mensyaratkan adanya draft yaitu surat perintah pembayaran dan penarik (*drawer*) kepada tertarik (*drawee*), maka yang bertindak sebagai penarik dalam drafts (*bill of exchange*) adalah eksportir, sementara yang tertarik (*drawee*) bisa issuing bank, *reimbursing bank* maupun *drawee bank*.<sup>87</sup>

### 3.7. *Presenter*

Presenter menurut Artikel 2 UCP 600 adalah *beneficiary*, bank atau pihak lain yang melakukan presentasi. Presentasi berarti salah satu pengiriman dokumen-dokumen berdasarkan credit kepada *issuing bank* atau *nominated bank* atau dokumen-dokumen demikian yang dikirimkan.

Presenter dapat diartikan sebagai siapa saja yang menyerahkan dokumen kepada *nominated bank*, *confirming bank* atau kepada *issuing bank*. Maka pihak tersebut dapat dikatakan sebagai presenter. Posisi ini bisa dilakukan oleh *beneficiary*, *nominated bank*, *confirming bank* atau siapa saja.<sup>88</sup>

## 4. Perjanjian Dasar Pembukaan *Letter of Credit* (L/C)

*Letter of Credit* (L/C) merupakan bentuk realisasi pembayaran, yakni pembayaran dan importir (pembeli) kepada eksportir (penjual) dengan

---

<sup>86</sup> *Ibid*, Hal. 29.

<sup>87</sup> Ec Warsidi, *Loc.Cit.*

<sup>88</sup> Ec Warsidi, *Loc.Cit.*

perantara bank. Sebagai suatu realisasi pembayaran L/C tidaklah berdiri sendiri melainkan didahului dengan transaksi yang ada sebelumnya yakni transaksi jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian atau kontrak jual beli.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Agus Svarnha, bahwa perjanjian pembukaan L/C yang diadakan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan perjanjian tambahan dan perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian jual beli yang tertuang dalam kontrak dagang (*Sales Contract*) antara eksportir dan importir.<sup>89</sup>

Berdasarkan *Absolute payment theory*, dengan L/C yang diterbitkan importir (pembeli) telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak jual beli, yaitu membayar harga atas barang yang diperjualbelikan kepada eksportir (penjual). Dalam pembayaran L/C pada hakikatnya bank memberitahukan kepada eksportir (penjual) bahwa uang yang dijanjikan importir (pembeli) telah berada padanya. Eksportir (penjual) dapat memperoleh pembayaran tersebut dengan syarat menyerahkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa dasar untuk membuka atau menerbitkan L/C adalah adanya kontrak jual beli (*sales contract*). *Sales contract* adalah perjanjian jual beli internasional yang mengikat secara hukum. Di dalam suatu *sales contract* eksportir (penjual) dan importir (pembeli) sebagai pihak-pihak utama masing-masing berasal dari negara yang berbeda. Namun demikian *sales contract* pada dasarnya tidak berbeda dengan perjanjian jual beli pada umumnya. Di mana inti daripada perjanjian jual beli adalah perjanjian

---

<sup>89</sup> Agus Svarnha sebagaimana dikutip Bagaskoro Arif Prabowo, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Dokumen-Dokumen yang Menyimpang (Discrepancy) di dalam L/C yang Dapat Dianggap sebagai Penunda atau Meniadakan Pembayaran*". (Skripsi tidak diterbitkan), 2011

timbang balik, pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang. Sedangkan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Apabila telah disepakati mengenai harga dan jumlah serta jenis barang maka perjanjian jual beli mengikat kedua belah pihak dan menimbulkan hak serta kewajiban antara satu dan lainnya.

Dalam hal ini penjual mempunyai dua kewajiban utama, yakni pertama, menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan dimana mengenai cara, waktu, dan tempat penyerahannya ditetapkan dalam perjanjian. Kedua, menanggung kenikmatan atas barang tersebut serta menanggung terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi. Dalam hal ini kualitas dan jumlah barang sesuai dengan yang diperjanjikan serta menjamin agar barang tidak rusak pada saat diserahkan kepada pembeli. Sedangkan kewajiban utama pembeli adalah membayar harga barang pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.

Demikian pula dengan *sales contract*, sebagai suatu perjanjian jual beli *sales contract* memuat hal-hal yang menjadi kewajiban penjual dan pembeli. Adapun hal-hal yang dimuat dan diperjanjikan dalam *sales contract* pada umumnya antara lain mengenai jumlah dan spesifikasi barang, harga barang, cara pembayaran, tanggal pengapalan, kota dan pelabuhan tempat di mana barang akan diserahkan, risiko dan *title*, asuransi, dokumen, *invoice*, *claim*, penolakan, *force majeure*, *bankruptcy*, hukum yang berlaku atas perjanjian dan arbitrase.

Dalam rangka melaksanakan perjanjian guna menghindari risiko dan berbagai masalah yang mungkin terjadi bagi eksportir maupun importir maka

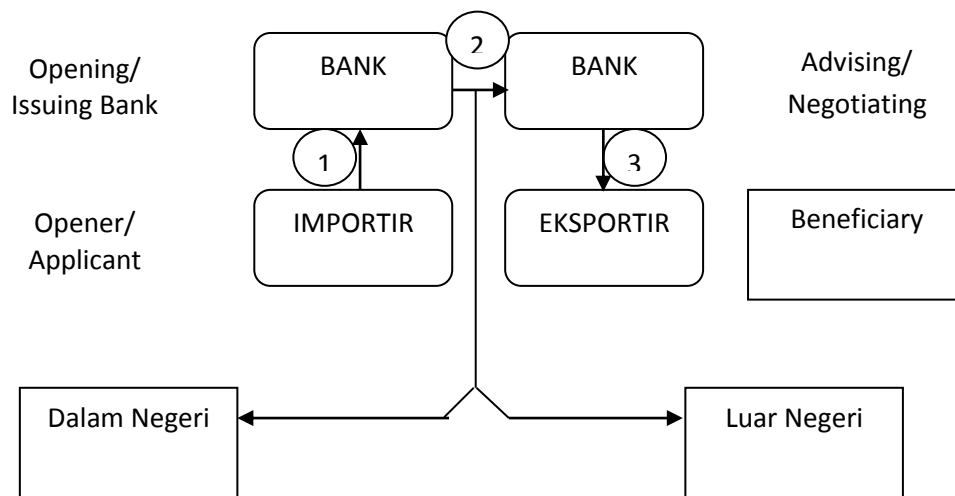
mengenai cara pembayaran yang disepakati dan ditetapkan di dalam *sales contract* adalah pembayaran dengan menggunakan L/C, termasuk jenis L/C yang digunakan dari bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran. Cara pembayaran dengan menggunakan L/C ini pada umumnya adalah atas permintaan eksportir (penjual) yang disepakati importir (pembeli).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian adanya suatu L/C atau diterbitkannya L/C adalah berdasarkan kontrak jual beli (*sales contract*). Tanpa adanya *sales contract* maka L/C tidak dapat diterbitkan. L/C diterbitkan berdasarkan kontrak jual beli (*sales contract*) yang mensyaratkan L/C sebagai cara pembayarannya. Dengan demikian keberadaan L/C secara hukum adalah sebagai realisasi pembayaran yang merupakan kewajiban pembeli.

Akan tetapi *sales contract* dan L/C adalah perjanjian yang terpisah dari masing-masing merupakan transaksi yang berdiri sendiri. *Sales contract* adalah kontrak dasar dan L/C. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam *sales contract* juga akan menjadi syarat-syarat dalam L/C akan tetapi tidak seluruhnya dan harus disesuaikan dengan peraturan hukum di negara masing-masing pihak.

## **5. Prosedur Pembukaan *Letter of Credit* (L/C)**

Awal dari proses pembukaan L/C adalah adanya kontrak jual beli antara penjual dan pembeli yang mensyaratkan pembukaan L/C sebagai pembayarannya, pembeli kemudian mengajukan aplikasi L/C kepada bank devisa di negaranya untuk manfaat pihak penjual. Jalannya pembukaan suatu L/C secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Skema Pembukaan Letter of Credit (LIC)**

- 1) Importir meminta banknya (*bank devisa*) membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini importir bertindak sebagai *opener*.<sup>90</sup> Sebagai opener, pada saat membuka L/C importir memberitahukan “*Term and Conditions*” yang dapat diterima serta nama advising bank yang ditunjuk oleh seller.<sup>91</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa L/C yang dibuka adalah atas dana yang dipersiapkan untuk melunasi hutangnya kepada eksportir, sejumlah yang disepakati dalam sales contract dan sesuai dengan syarat-syarat pencairan yang disebut dalam *Miles Contract* dan merujuk pada ketentuan dari *The Uniform Customs and Practise for Documentary Letter of Credit* dan Kamar Dagang Internasional, Paris No. 600 atau UCP 600.<sup>92</sup>

Bank devisa yang diminta eksportir membuka L/C itu disebut *opening bank*. *Opening bank* inilah yang bertanggung jawab melakukan pembayaran atas L/C itu kepada eksportir penenima L/C. Importir yang disebut pembukaan L/C disebut *applicant*.

<sup>90</sup> Amir M.S., *Op.Cit.*, Hal. 5

<sup>91</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, Hal. 36.

<sup>92</sup> Agus Svarnha, *Op.Cit*, hal. 33.

- 2) Bilamana importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya Surat Impor, maka bank melakukan penutupan Kontrak Valuta (KV) dengan importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *Opening* atau *Issuing Bank*. Pembukaan L/C ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua ini disebut *Advising Bank* atau *Notifying Bank*.<sup>93</sup>

Pembukaan L/C melalui bank koresponden di luar negeri (di negara eksportir) dilakukan melalui surat, kawat, teleks, faksimile, atau media elektronik lainnya yang sah. Penegasan pembukaan L/C dalam bentuk tertulis itu disebut L/C confirmation yang diteruskan oleh *opening bank* kepada bank korespondennya untuk disampaikan kepada penerima, yaitu eksportir yang disebut dalam surat itu.<sup>94</sup>

- 3) *Advising Bank* memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan L/C tersebut. Eksportir yang menerima L/C disebut *beneficiary*. Bila *Advising Bank* juga dikuasakan untuk membeli wesel-wesel yang ditarik oleh eksportir atas L/C, maka *advising bank* ini dapat juga disebut *Negotiating Bank*.<sup>95</sup>

*Advising Bank* setelah meneliti keabsahan amanat pembukaan L/C yang diterimanya dari *opening bank* meneruskan amanat pembukaan L/C itu kepada eksportir yang berhak menerima dengan surat pengantar dari *Advising Bank*. Surat pengantar itu disebut L/C *advice*, sedangkan eksportir penerima L/C disebut sebagai *beneficiary* dan L/C itu. Bila *Advising Bank* diminta dengan tertulis oleh *opening bank* untuk turut menjamin

---

<sup>93</sup> Amir M.S., *Op.Cit.*, Hal. 5

<sup>94</sup> Agus Svarnha, *Op.Cit*, hal. 33.

<sup>95</sup> Amir M.S., *Op. Cit.*, Hal. 5.

pembayaran atas L/C tersebut, maka Advising Bank juga disebut sebagai *confirming bank*.<sup>96</sup>

## 6. Dokumen-Dokumen Dalam *Letter of Credit* (L/C)

*Beneficiary* harus memenuhi syarat-syarat khusus yang tertera dalam L/C yakni berupa dokumen-dokumen tertentu disertai dengan draftnya itu sendiri. Dokumen tersebut sebagai bukti pelaksanaan oleh *beneficiary* mengenai *sales contract* di pihaknya dan pemindahan kepemilikan atas barang.<sup>97</sup>

*Issuing Bank* akan melakukan pembayaran kepada *beneficiary* apabila sudah menerima dokumen-dokumen yang cocok sesuai dengan L/C. Sehingga bisa dikatakan bahwa dokumen-dokumen dalam L/C memegang peran yang penting dalam transaksi ekspor impor.<sup>98</sup>

Dengan cara ini pihak pembeli memperoleh suatu kepastian bahwa ia akan menerima barang-barang yang telah disetujui dan ditetapkan pembayaran olehnya. Begitu pula bank yang bersangkutan dengan transaksi ini diberikan hak kepemilikan atas barang-barang, sehingga dengan demikian dapat dijamin bahwa pembeli akan memenuhi kewajibannya berdasarkan persetujuan dengan L/C tersebut.<sup>99</sup>

### 6.1. Tanggung Jawab Bank terhadap Dokumen

Menurut Maurice Megrah, syarat pembayaran L/C adalah pengajuan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. Pengajuan dokumen-dokumen ini merupakan kondisi agar L/C dapat

---

<sup>96</sup> Agus Svarnha, *Op.Cit.*, Hal. 92

<sup>97</sup> Soepriyo Andhibroto, *Op.Cit.*, Hal. 160.

<sup>98</sup> Ec Warsidi, *Op.Cit.*, Hal. 39.

<sup>99</sup> Soepriyo Andhibroto, *Op.Cit.*, Hal. 160.

dibayar atau diaksep dan dibayar pada saat jatuh tempo.<sup>100</sup> Dokumen-dokumen tersebut adalah dasar utama untuk menentukan sikap bank dalam rangka pembayaran L/C.<sup>101</sup>

Artikel 4 UCP 500 memuat ketentuan sebagai berikut:

*“In credit operations all parties concerned deal with documents, and not with goods, services and/or other performances to which the documents may relate.”*

Selanjutnya, artikel 5 UCP 600 memuat ketentuan sebagai berikut:

*“Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the document may relate”*

Dalam hal ini. Perbedaan antara UCP 500 dan UCP 600 adalah pada penekan pihak yang melaksanakan L/C. UCP 500 mengatakan pihak yang melaksanakan L/C adalah *all parties*, berarti meliputi bank penerbit, bank yang ditunjuk dan penerima. Sementara, UCP 600 mengatakan pihak yang melaksanakan L/C adalah *banks*, berarti hanya meliputi bank penerbit dan bank yang ditunjuk.<sup>102</sup>

Apabila mendasarkan pada ketentuan Artikel 4 UCP 500 atau Artikel 5 UCP 600, bank harus membayar dokumen-dokumen yang diajukan sepanjang dokumen-dokumen tersebut telah memenuhi persyaratan L/C. Bank dalam melaksanakan L/C hanya berurusan dengan dokumen-dokumen saja. Sehingga inti dan realisasi L/C adalah kesesuaian dokumen-dokumen dengan persyaratan L/C. Oleh karena itu,

---

<sup>100</sup> Maurice Megrah, *Risk Aspects of The Irrevocable Documentary Credit*, sebagaimana dikutip oleh Ramlan Ginting, *Op.Cit.*, Hal. 217.

<sup>101</sup> Ramlan Ginting, *Loc. Cit.*

<sup>102</sup> Ramlan Ginting, *Loc.Cit.*



bank wajib melakukan penelitian atas dokumen-dokumen untuk menentukan apakah dokumen-dokumen itu dapat dibayar atau tidak. Patokan menentukan dokumen adalah UCP.

Bank wajib melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang diajukan kepadanya untuk menentukan apakah dokumen-dokumen telah sesuai dengan persyaratan L/C. menurut Artikel 13 a UCP 500, ukuran kesesuaian didasarkan pada standar praktik perbankan internasional. Dokumen-dokumen yang tidak konsisten (*inconsistent*) satu terhadap yang lainnya merupakan cerminan bahwa tidak terdapat kesesuaian antara dokumen-dokumen dan persyaratan L/C. Sementara menurut Artikel 14 a dan d UCP 600, ukuran kesesuaian didasarkan pada ada tidaknya pertentangan antara data dalam dokumen dengan data dalam dokumen dimaksud, dokumen yang disyaratkan lainnya atau L/C. ukuran untuk menentukan ada atau tidaknya pertentangan didasarkan pada L/C, dokumen itu sendiri dan standar praktik perbankan internasional.<sup>103</sup>

Keputusan untuk menentukan dokumen-dokumen secara fisik (*formal*) telah atau belum sesuai dengan persyaratan L/C dan secara substansil dokumen-dokumen telah atau belum konsisten satu dengan lainnya sepenuhnya didasarkan hasil penelitian bank, bukan pemahaman pihak lain. Penelitian dokumen-dokumen semacam ini dinamakan penelitian berdasarkan tampak muka (*appear on theirface*).<sup>104</sup>

Standar praktik perbankan internasional yang merupakan ukuran untuk menentukan kesesuaian dokumen dengan L/C tidak membatasi kewajiban bank hanya untuk melaksanakan ketelitian yang

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, Hal. 219-220.

<sup>104</sup> Ramlan Ginting, *Loc.Cit.*

wajar ketika meneliti dokumen-dokumen. Ukuran tersebut dimaksudkan untuk menentukan cakupan dalam mana ketelitian yang wajar diaplikasikan. Gagasan ketelitian yang wajar sering digunakan oleh pengadilan-pengadilan dalam kaitannya dengan doktrin Kesesuaian Mutlak.

Berdasarkan Artikel 14 b UCP 600, bank dalam meneliti dokumen-dokumen memiliki waktu maksimum 5 (lima) hari kerja perbankan setelah hari presentasi untuk menentukan presentasi yang sesuai. Dalam Artikel 15 UCP 600 mengatakan bahwa bank penerbit dan bank pengkonfirmasi wajib melakukan *honour* atau *negotiate* alas presentasi yang sesuai. Artinya begitu bank penerbit atau bank pengkonfirmasi telah menetapkan presentasi yang sesuai berdasarkan Artikel 14 b UCP 600, maka berdasarkan Artikel 15 UCP 600 bank penerbit atau bank pengkonfirmasi memasuki proses *settlements* untuk *honour* atau *negotiate*. Pada intinya Artikel 15 UCP memuat kewajiban membayar ketika presentasi telah sesuai, tanpa mengatur kapan realisasi *honour* atau *negotiate* itu.

## 6.2. Dokumen yang Disyaratkan L/C

Dokumen-dokumen yang diajukan oleh penerima selain wesel bervariasi tergantung pada keinginan para pihak yang diuraikan dalam L/C. Namun, pada umumnya L/C mensyaratkan untuk diajukan kepada bank dokumen-dokumen yang terdiri dari faktur dagang (*commercial invoice*), konosemen (*bill of lading*), dan dokumen asuransi (*insurance document*). Dalam hal diperlukan para pihak dapat mensyaratkan dalam L/C dokumen tambahan seperti faktur konsulat (*consular invoice*), surat

keterangan asal (*certificate of origin*), surat keterangan mutu (*certificate of quality*), tanda terima penggudangan barang (*warehouse receipt*).<sup>105</sup>

Dokumen-dokumen yang perlu disertakan dalam pencairan L/C yaitu dokumen-dokumen yang diperoleh oleh eksportir dari kegiatan pengapalan barang maupun dokumen pengawasan dari pihak berwenang yang terkait dengan penjualan barang. Dokumen-dokumen tersebut dapat dildasifikasikan sebagai berikut:<sup>106</sup>

1) Dokumen-Dokumen Pokok/Utama

a) Konosemen atau *Bill of Loading* (B/L)

Kitab Undang-undang Hukum Dagang Buku II Bab V. A, tentang Pengangkutan Barang di dalam Pasal 506 memberikan pengertian B/L atau konosemen:

Konosemen adalah suatu Surat yang bertanggal, dalam mana si pengangkut menerangkan, bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkannya kepada seseorang tertentu yang ditunjuk beserta dengan klausula-klausula apa penyerahan akan terjadi.

Berdasarkan Artikel 20 UCP 600, B/L harus:

1. Mengindikasikan nama pengangkut dan ditandatangani oleh:
  - Pengangkut atau agen yang ditunjuk untuk atau atas nama pengangkut, atau
  - Nakhoda kapal atau agen yang ditunjuk untuk atau atas nama nakhoda kapal.
2. Mengindikasikan bahwa barang telah dimuat di atas sebuah kapal yang ditunjuk di pelabuhan muat yang dinyatakan dalam kredit dengan:
  - Rumusan kata yang telah dicetak, atau
  - Notasi *on board* yang mengindikasikan tanggal pada saat mana barang telah dimuat di atas kapal.

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, Hal. 225.

<sup>106</sup> H. R. A. Rivai Wirasmita, *et. Al*, 1996, *Seluk Beluk Kredit Berdokumen dan Peraturan Devisa*, Bandung, Pionir Jaya, hal. 137.

3. Mengindikasikan pengiriman dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar yang dinyatakan dalam kredit.
4. Merupakan satu-satunya *bill of loading* asli atau jika diterbitkan lebih dari satu asli, merupakan seperangkat lengkap sebagaimana diindikasikan pada *bill of loading*.
5. Memuat syarat dan kondisi pengangkutan atau membuat rujukan pada sumber lain yang memuat syarat dan kondisi pengangkutan (*short form atau blank back bill of loading*). Isi dan syarat dari kondisi pengangkutan tidak akan diperiksa.
6. Tidak memuat indikasi bahwa *bill of loading* tunduk pada *charter party*.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, suatu konosemen dipandang sah apabila telah memenuhi beberapa persyaratan seperti:

- 1) Harus dikeluarkan atau dibuat oleh seorang pengangkut dan ditandatangani dan ditanggali;
- 2) Memuat pernyataan dari pengangkut bahwa ia telah menerima sejumlah barang;
- 3) Memuat pernyataan dari pengangkut bahwa ia akan mengangkut barang-barang yang diterimanya dan sesuai dengan syarat-syarat penyerahannya akan diserahkan di tempat tujuan;
- 4) Memuat syarat-syarat penyerahan.<sup>107</sup>

*Bill of Loading* (B/L) atau sering juga disebut dengan *marine bill of loading* atau konosemen adalah dokumen pengapalan yang paling penting. Hal ini disebabkan oleh sifat jaminan atau keamanan dan B/L. Menurut Agus Svarnha, B/L menunjukkan hal kepemilikan atas barang-barang yang dikirim melalui laut ke sesuatu tujuan tertentu, dan selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada penerima.<sup>108</sup>

B/L memiliki beberapa fungsi, yakni:<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, sebagaimana dikutip Soepriyo Andhibroto, Hal. 176.

<sup>108</sup> Agus Svarnha Nurpatia, *Op. Cit.*, hal. 42-43.

<sup>109</sup> Soepriyo Andhibroto, *Op.Cit.*, Hal. 176

- a. Sebagai bukti penerimaan muatan dari *shipper* untuk diangkut ke pelabuhan tujuan yang tercantum dalam *Bill of Lading*.
- b. Sebagai kontrak pengangkutan laut antara tiga pihak yaitu *shipper* (pengirim/eksportir), *carrier* (perusahaan pelayaran) dan *Cosignee* (penerima barang/Importir).
- c. Sebagai kuitansi pembayaran uang tambang (*freight*) apabila uang tambang dibayar di pelabuhan muat (*freight prepaid*) atau perjanjian pembayaran uang tambang bila uang, tambang dibayar dipelabuhan tujuan (*freight payable at destination*)
- d. Sebagai *documents title*, artinya pemegang *Bill of Lading* adalah pemilik barang yang disebutkan didalamnya. Sebagai dasar penyelesaian klaim/tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengirim muatan atau wakilnya kepada pengangkut/perusahaan asuransi berhubungan dengan kekurangan atau kerusakan pada barang muatan.

B/L sebagai dokumen transportasi dapat berbentuk atas nama, atas pengganti, ataupun atas tunjuk. Suatu B/L dikatakan atas nama jika nama si penerima disebut dengan jelas didalamnya, sehingga membawa konsekuensi penyerahannya dilakukan dengan *Cession*. B/L atas pengganti dapat diperalihkan dan juga dapat dikatakan cukup aman. Cara penyerahan untuk B/L atas pengganti dilakukan dengan *Endorsement*. Selanjutnya mengenai B/L atas tunjuk di dalamnya terkandung risiko yang besar sekali karena penyerahan hak atas B/L itu hanya terjadi dari tangan ke tangan saja, sehingga kemungkinan jatuh ketangan orang yang tidak berhak adalah lebih besar.<sup>110</sup>

B/L sebagaimana telah dikatakan sebelumnya merupakan dokumen transportasi yang dapat berbentuk atas nama, atas pengganti, ataupun atas tunjuk. B/L dapat diklasifikasikan

---

<sup>110</sup> Agus Svarnha Nurpatria, *Op.Cit.*, hal. 72

berdasarkan jenis atau tipenya, yang secara umum jenis – jenis *Bill of Lading* dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>111</sup>

1. *Negotiable B/L (Original B/L)* dan *Non Negotiable B/L*

*Negotiable B/L* adalah B/L yang dapat digunakan sebagai dokumen berharga untuk pencairan L/C atau dapat diperjualbelikan. Sebagai lawan *Negotiable B/L* ini kita mengenal *Non Negotiable B/L* yaitu copy B/L yang tidak dapat dipergunakan untuk pencairan L/C.

2. *On Board B/L* dan *Receipt B/L*

*On Board B/L* adalah B/L yang diterbitkan oleh pengangkut sebagai tanda terima barang dimana barangnya sudah diterima di atas kapal pengangkut. Sedangkan *Receipt B/L* adalah B/L yang diterbitkan pengangkut, namun barang belum diterima di atas dek kapal.

3. *Foul B/L atau Dirty B/L / Unclean B/L*

Jenis B/L yang mengandung catatan atau kerusakan barang atau cacat barang. Seperti terkandung dalam pasal 32 ayat b UCP 500, maka bank akan menolak jenis B/L ini, kecuali ada surat pernyataan / jaminan dari pemilik barang atau pihak shipper untuk memberikan jaminan untuk tidak melakukan pengklaiman dikemudian hari, surat pernyataan tersebut dikenal dengan *Letter of Indemnity*. Bila pihak bank menerima jenis Clean B/L disertai dengan *Letter of Indemnity*, maka pihak bank mengetahui bahwa keadaan

---

<sup>111</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, sebagaimana dikutip oleh Agus Svarnha Nurpatricia, *Ibid*, hal. 52-55.

barang yang akan diangkut oleh maskapai pelayaran tersebut terdapat catatan tentang keadaan fisik barang, namun ketentuan dalam artikel / pasal tersebut memungkinkan bank menerima dokumen tersebut.

4. *Clean Bill of Lading* atau B/L yang bersih

Jenis B/L yang tidak mengandung catatan tentang keadaan fisik barang yang telah diangkut oleh perusahaan pelayaran yang mengeluarkan B/L tersebut.

5. *Longform B/L* dan *Short Form B/L*

*Long form B/L* merupakan B/L yang mencantumkan syarat-syarat pengangkutan pada halaman belakangnya yang merupakan sumber acuan. Jika, terjadi perselisihan antara pengirim dan pengangkut. Syarat-syarat itu diterapkan secara sepihak oleh perusahaan pelayaran. Sebaliknya *Short Form B/L* tidak mencantumkan syarat-syarat pengangkutan tersebut. Jika terjadi perselisihan maka hukum di mana perusahaan pelayaran berdomisili yang dipakai.

6. *Combined Transport B/L* (Multimodal B/L) dan *Single*

Multimodal B/L adalah jenis B/L yang menggunakan lebih dari satu macam alat transportasi dengan B/L yang sama. Alat angkutan tersebut dapat berupa alat transportasi udara, laut dan darat. Sedangkan *Single B/L*, hanya menggunakan satu alat angkut saja.

7. *Express B/L*

*Express B/L* adalah B/L yang dikirim melalui faxcimile, dan untuk itu B/L yang asli tidak perlu diserahkan.

8. *Stale B/L*

*Stale B/L* adalah B/L yang dapat dikatakan sudah daluwarsa karena B/L tersebut datangnya terlambat dan kapal pengangkut telah datang terlebih dulu. Hal seperti ini bisa saja terjadi untuk jarak pengangkutan yang dekat. Lazimnya B/L dianggap “terlambat” jika diajukan ke bank lebih dari 21 hari dihitung dari tanggal pengeluaran B/L tersebut. Tujuannya adalah untuk melindungi importir dari biaya-biaya yang tidak perlu karena kelambatan penyelesaian pabean, sebagai akibatnya terlambatnya importir menerima dokumen pengapalan.

9. *Switch B/L*

*Switch B/L* merupakan B/L yang diganti. Hal seperti ini biasanya terjadi dalam *Back to Back L/C*, dimana perantara / trader tidak ingin pembeli mengetahui alamat penjual, sehingga nama shipper diganti dengan nama trader dalam B/L.

10. *Third Party B/L*

Dalam jenis B/L ini nama shipper yang tercantum dalam L/C adalah nama *shipper* lain. Misalnya karena eksportir awal tidak sanggup mengirimkan barang, sehingga diambil alih oleh *shipper* lain. Syarat penggunaan B/L jenis ini



adalah jika L/C membolehkannya, kalau tidak diatur maka tidak boleh dipergunakan. Dengan demikian perlu adanya kesepakatan antara pihak yang terkait dalam penggunaan B/L ini.

11. *Ocean B/L dan House B/L*

Ocean B/L adalah B/L, yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran, sedangkan House B/L adalah B/L yang diterbitkan oleh *forwarding company*.

12. *Chartered B/L*

*Chartered B/L* adalah B/L yang diterbitkan oleh pihak yang mencharter kapal.

b) Faktur Dagang (*Commercial Invoice*)

Commercial Invoice adalah suatu daftar mengenai barang-barang yang menunjukkan harga, jumlah, biaya angkutannya dan lain-lain lagi yang dikirimkan kepada pembeli. *Commercial Invoice* biasanya memuat keterangan-keterangan mengenai:<sup>112</sup>

1. Tanggal;
2. Nama dan alamat pembeli maupun penjual;
3. Nomor order atau kontrak, jumlah dan uraian barang, harga satuan, perincian dari setiap biaya lain yang telah disetujui dan jumlah harga keseluruhan;
4. Berat barang, jumlah *coli* dan *shipping marks*;
5. Syarat-syarat penyerahan dan pembayaran;
6. Perincian pengapalan barang.

---

<sup>112</sup> Soperiyo Andhibroto, *Op.Cit.*, Hal. 167

Commercial invoice harus diterbitkan oleh penerima dan harus ditujukan kepada pemohon dan tidak perlu ditandatangani kecuali L/C menentukan lain. Pada Artikel 18 UCP 600 terdapat persyaratan berupa keharusan valuta yang sama antara *commercial invoice* dan L/C.

*Commercial invoice* juga harus memuat uraian barang secara lengkap dan tepat sesuai dengan uraian barang dalam UC. Adapun kata *must corresponden* tidak berarti bahwa uraian barang dalam *commercial invoice* harus benar-benar sama dengan uraian barang dalam L/C, tetapi tidak boleh ada perbedaan dalam kata-kata yang diuraikan. Hal ini adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Artikel 18 dan Artikel 16 UCP 600.<sup>113</sup>

c) Dokumen Asuransi

Dokumen asuransi yang terdiri dari polis asuransi, sertifikat asuransi, ataupun pernyataan penjamin yang menggunakan *open cover* harus diterbitkan dan ditandatangani oleh perusahaan-perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan atau agennya atau perwakilan-perwakilannya yang memenuhi syarat bahwa dia memang berhak mewakili perusahaan asuransi maupun perusahaan penjaminan. Pada prinsipnya polis asuransi, sertifikat asuransi dan pernyataan penjaminan yang menggunakan *open cover* bisa diterima sebagai syarat untuk

---

<sup>113</sup> Ramlan Ginting, *Op.Cit.*, Hal. 232.

memenuhi dokumen asuransi sesuai permintaan L/C. Apabila dokumen asuransi (original) diterbitkan lebih dari satu, maka semua asli yang diterbitkan harus diserahkan ke bank sebagai syarat kelengkapan dokumen.<sup>114</sup>

Dokumen asuransi terdiri dari *Insurance Policy*, *Insurance Certificate*, dan *Cover Note*. Adapun pengertian dari ketiganya adalah sebagai berikut:

1. *Insurance Policy*

Polis Asuransi ini menyatakan bukti kontrak asuransi atas barang-barang yang akan diangkut dengan kapal dan si tertanggung yang membayar premi.

2. *Insurance Certificate*

Merupakan surat keterangan yang menjelaskan terhadap barang-barang tertentu telah dilakukan penutupan asuransinya dalam bentuk *Open policy*. *Open policy* ini diperlukan untuk pengapalan-pengapalan dalam jumlah yang tidak terbatas. Setiap kali yang bersangkutan mengapalkan barang, ia akan memberitahukan perusahaan asuransi dan membayar preminya.

3. *Cover Note*

Merupakan sebuah pemberitahuan yang digunakan sebagai “permulaan alat bukti” dari perusahaan asuransi yang menyatakan bahwa sebuah asuransi telah ditutup

---

<sup>114</sup> Ec Warsidi, *Op.Cit.*, Hal. 61

sementara menunggu polis atau sertifikat asuransi dikeluarkan.

Artikel 34 UCP 500 mengatur bahwa *insurance document* memuat dan mengikuti hal-hal pokok sebagai berikut:<sup>115</sup>

- a. Penerbitan dan penandatanganan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan penanggung (*underwriter*) atau agen salah satu perusahaan tersebut;
- b. Penyerahan semua asli jika dokumen asuransi menyatakan diterbitkan lebih dari satu asli, kecuali L/C menentukan lain;  
Penolakan cover note yang diterbitkan oleh perusahaan perantara (*broker*), kecuali secara khusus L/C memperkenankan;
- c. Penerimaan sertifikat asuransi atau *declaration under an open cover* yang ditandatangani terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi atau perusahaan penanggung atau agen dari masing-masing perusahaan, kecuali L/C menentukan lain. Jika L/C secara khusus mensyaratkan sertifikat asuransi atau *declaration under an open cover*, polis asuransi sebagai gantinya dapat diterima;
- d. Penolakan dokumen asuransi yang bertanggal penerbitan sesudah tanggal pemuatan barang di atas kapal atau tanggal pemberangkatan barang atau tanggal penguasaan barang sebagaimana diindikasikan dalam dokumen angkutan, kecuali L/C menentukan lain, atau kecuali dokumen asuransi mencantumkan bahwa penutupan asuransi efektif pada tanggal terakhir dan tanggal pemuatan barang di atas kapal atau tanggal pemberangkatan barang atau tanggal penguasaan barang;
- e. Kesamaan mata uang dengan L/C, kecuali L/C menentukan lain;
- f. Kecuali L/C mengatur lain, jumlah minimum yang tercantum dalam dokumen asuransi harus menunjukkan penutupan asuransi sebesar nilai barang CIF atau CIP ditambah 10%, tetapi hanya jika nilai CIF atau CIP dapat ditentukan berdasarkan dokumen dokumen. Kalau tidak dapat ditentukan nilai CIF atau CIP, dapat diterima sebagai jumlah minimum 110% dari jumlah pembayaran, akseptasi atau negosiasi yang diminta L/C, atau 110% dari jumlah kotor yang tertera dalam faktur, mana yang lebih besar jumlahnya.

---

<sup>115</sup> Agus Svarnha Nurpatricia, *Op.Cit*, Hal. 62-63

Dalam Pasal 28 UCP dicitakan bahwa:

Dokumen asuransi, seperti *insurance policy*, *insurance certificate*, atau *declaration under an open cover*, wajib terlihat akan diterbitkan dan ditandatangani oleh perusahaan asuransi, *underwriter*, atau agen atau perwakilan mereka.

Dokumen asuransi dan dokumen transportasi memiliki kemiripan yaitu diterbitkan dalam lebih dari satu dokumen asli. Jika dokumen asuransi diterbitkan lebih dari satu dokumen asli, maka semua dokumen asli tersebut harus diajukan kepada bank.<sup>116</sup>

Penutupan asuransi dianggap efektif jika dokumen asuransi memuat tanggal penerbitan tidak melampaui tanggal pemuatan barang di atas kapal atau tanggal pengiriman barang sebagaimana dinyatakan dalam dokumen transportasi. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 28 huruf (e) UCP 600.

d) Draft (Wesel)

Menurut Ec Warsidi, draft atau sering disebut dengan *bill of exchange* atau wesel adalah surat perintah pembayaran dari pihak penarik kepada pihak tertarik tanpa syarat apapun. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam draft adalah:<sup>117</sup>

1. Penarik (*Drawer*)

Penarik merupakan pihak yang mempunyai tagihan yaitu eksportir yang menerbitkan *drafts*. Dalam hal ini karena dia sudah mengirimkan barang kepada importer

---

<sup>116</sup> Ramlan Ginting, Op. Cit, hal. 111

<sup>117</sup> Ec Warsidi, *Op.Cit.*, Hal. 46

maka dia memiliki tagihan sebesar barang yang dikirimkan.

## 2. Tertarik (*Drawee*)

Tertarik adalah pihak yang terhutang, yaitu pihak yang harus membayar atas *drafts* yang diterbitkan oleh penarik. Dalam hal ini, adalah *issuing bank* atau bank lain yang ditunjuk untuk membayar, biasanya bank di mana *issuing bank* mempunyai rekening.

## 3. Penerima Dana (*Payee*)

Penerima dana adalah pihak yang ditunjuk untuk menerima dana atau pihak yang berhak menerima dana atas *draft* yang diterbitkan. Dalam hal ini bisa eksportir, *nominated bank*, atau pihak lainnya.

Fungsi wesel sama dengan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian. Apabila suatu L/C, telah disyaratkan disertai dengan wesel, maka seorang penjual akan menerima pembayaran setelah menyerahkan dokumen-dokumen disertai dengan wesel.<sup>118</sup>

## 2) Dokumen-Dokumen Lain (Tambahan)

### a) *Certificate of Origin*

*Certificate of Origin* adalah sertifikat yang menyatakan keterangan asal barang yang salah satu fungsinya untuk menetapkan berapa besarnya bea masuk untuk barang yang

---

<sup>118</sup> Agus Svarnha Nurpatricia, *Op.Cit.*, Hal. 63.

diimpor di negara tujuan. Dokumen ini dapat diterbitkan oleh pemerintah maupun swasta, di Indonesia *certificate of origin* diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan untuk negara-negara lain dapat diterbitkan oleh KADIN negara setempat atau bahkan dapat diterbitkan oleh eksportir sendiri).<sup>119</sup>

Menurut Hartono Hadisoeparto, *Certificate of Origin* adalah

suatu dokumen dari negara asal barang dalam mana dijelaskan bahwa barang-barang yang bersangkutan benar-benar hasil produksi dari negara yang bersangkutan, sehingga dokumen ini secara tidak langsung memberi jaminan atas kualitas barang kepada pembeli.<sup>120</sup>

*Certificate of Origin* sangat penting untuk mengetahui secara pasti bahwa barang-barang itu benar-benar dari negara tertentu yang dimaksudkan oleh pembeli (importir). Oleh karena itu banyak importir-importir yang mensyaratkan *certificate of origin* secara mutlak di dalam kreditnya. Hal ini karena banyak negara-negara lainnya yang juga memproduksi barang-barang seperti itu.<sup>121</sup>

#### b) Packing List

*Packing list* adalah suatu dokumen pelengkap dari invoice yang menerangkan secara tepat dan rinci tentang isi atau kandungan setiap *pack* barang, termasuk mengenai cara barang *dipacking*. Keterangan yang dicantumkan, tidak jauh

---

<sup>119</sup> Ec Warsidi, *Op.Cit.*, Hal. 59.

<sup>120</sup> Hartono Hadisoeparto, *Op.Cit.*, Hal. 83.

<sup>121</sup> Hartono Hadisoeparto, *Loc.Cit.*

berbeda dengan *invoice*. Terkecuali masalah harga barang yang biasanya tidak dicantumkan.<sup>122</sup>

*Packing list* disebut juga sebagai *draft* pengepakan atau daftar isi peti. Oleh karena itu mak di dalam *packing list* lazimnya berisi daftar atau perincian lengkap mengenai barang-barang yang terdapat di dalam setiap peti. Ini dimaksud agar setiap peti dapat dengan mudah diketahui isinya, baik jenisnya maupun jumlahnya.<sup>123</sup>

*Packing list* dibuat dan ditandatangani oleh skportir yang menyebutkan perincian isi barang setiap peti (*colli*), karung atau bal.<sup>124</sup> *packing list* ini penting dalam hal barang-barang yang dikirim itu tidak sejenis atau tidak sama bentuk dan warnanya. Sehingga dengan adanya *packing list* itu kemungkinan terjadinya kekeliruan dapat dikurangi.<sup>125</sup>

d) *Weight List*

*Weight List*, disebut juga *certifict of weight*, atau *weight note* adalah daftar perincian timbangan atau ukuran dari tiap-tiap peti pengepakannya. Oleh karena itu di dalam *weight list* biasanya memuat penjelasan tentang berat bersih barang (*netto weight*) atau berat kotor dari barang yang bersangkutan (*gross weight*).<sup>126</sup> *Weight list* dibuat dan ditandatangani oleh eksportir

---

<sup>122</sup> Ec Warsidi, *Op.Cit.*, Hal. 56

<sup>123</sup> Hartono Hadisoeparto, *Op.Cit.*, Hal. 82

<sup>124</sup> Soepriyo Andhibroto, *Op.Cit.*, Hal. 200.

<sup>125</sup> Hartono Hadisoeparto, *Op.Cit.*, Hal. 82

<sup>126</sup> Hartono Hadisoeparto, *Ibid*, Hal. 84



yang menyebutkan perincian berat bruto dan netto, merek dan nomor.<sup>127</sup>

- d) Dokumen-Dokumen Lain Yang Diperlukan Sesuai Dengan Jenis Barang Ekspor.

Penentuan jenis dokumen tambahan yang diperlukan tergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan dan juga pada kondisi yang ada dalam rangka merealisasikan jual beli tersebut. Dengan adanya keperluan atas dokumen lainnya yang bersifat kasuistik, maka dokumen lainnya yang itu tidak perlu diatur dalam UCP yang seharusnya hanya memuat ketentuan pelaksanaan L/C yang bersifat umum.<sup>128</sup>

## 7. Pembayaran *Letter of Credit* (L/C)

Menurut Hartono Hadisoeparto, tahapan-tahapan dari proses tata cara pembayaran dengan LIC sebagai berikut:<sup>129</sup>

### a. Tahap penerbitan

Pada tahap penerbitan ini dimulai dengan adanya perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli (*sales contract*), dimana disepakati pula bahwa pembayaran akan dilakukan dengan L/C. Oleh karena itu tindak selanjutnya ialah pembeli atau importir mengajukan permohonan kepada bank untuk membukakan kredit dengan disertai perintah untuk membayarkan kepada penjual atau eksportir.

Sehingga dengan demikian importir disebut sebagai pembuka L/C (*opener*), pihak bank disebut sebagai bank pembuka (*issuing bank*) dan

---

<sup>127</sup> Soepriyo Andhibroto, *Op.Cit.*, Hal. 200

<sup>128</sup> Hartono Hadisoeparto, *Op.Cit.*, Hal. 30-31

<sup>129</sup> Hartono Hadisoeparto, *Op.Cit.*, Hal. 30-31

eksportir disebut sebagai *beneficiary*. Selanjutnya setelah bank menerima perintah dan importir lalu meminta kepada bank koresponden, yaitu bank di negara ekportir agar memberitahukan kepada eksportir bahwa telah dibukakan credit untuk pembayaran jual beli itu. Bank yang mempunyai kewajiban itu diisebut sebagai *advising bank*.

b. Tahap presentasi

Pada tahap presentasi atau pengunjukan dokumen, setelah *beneficiary* menerima pemberitahuan dari *advising bank*, maka ia segera akan melakukan pengiriman barang-barang yang telah diperjanjikan dalam tenggang yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan dalam L/C. selanjutnya *beneficiary* menyampaikan dokumen tersebut kepada *advising bank* atau *confirming bank* dan seterusnya *advising bank* menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada *issuing bank*.

c. Tahap pembayaran

Tahap pembayaran yaitu setelah *issuing bank* menerima dokumend okumen dan *advising bank*, lain mengadakan penelitian terhadap dokumen-dokumen tersebut. Apabila telah sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam L/C maka ia akan melakukan pembayaran kepada penjual (*beneficiary*), atau melakukan *reimburse* kepada *confirming bank* atau kepada bank lain yang telah melakukan pembayaran atau mengakspetasi atau menegosiasi wesel atas L/C. Sehingga akhimya *issuing bank* menyampaikan dokumen itu kepada pembeli atau opener, setelah pembeli membayar kembali kredit yang telah dibuka dan *issuing bank* tadi.

Soepriyo Andhibroto mengatakan bahwa pelaksanaan penyelesaian pembayaran meliputi beberapa cara.<sup>130</sup>

1) Penyelesaian Pembayaran dengan Pembayaran Tunai

Untuk memperoleh pembayaran atas barang yang telah dikapalkan, pihak penjual menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta dalam bC kepada bank pembayar (*paying bank*) yang telah dikuasakan untuk melakukan pembayaran. Setelah bank melakukan pemeriksaan atas dokumen tersebut dan jika ternyata memenuhi semua syarat serta kondisi L/C, maka bank akan segera melakukan pembayaran kepada pihak *beneficiary* dan kemudian mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada *issuing bank*. Atas pembayaran yang telah dilakukan itu *paying bank* akan memperoleh *reimbursement* dari *issuing bank* menurut cara yang telah disepakati sebelumnya.

Penyelesaian pembayaran dengan pembayaran tunai ini pelaksanaannya ada yang menggunakan *draft* (wesel) dan ada pula yang tidak. Hal ini tergantung syarat yang disebutkan di dalam L/C.

Akan tetapi dalam praktik penyelesaian pembayaran dengan pembayaran tunai ini kebanyakan dilaksanakan tanpa menggunakan *draft*.

2) Penyelesaian Pembayaran dengan Pembayaran Bertangguh

Penyelesaian pembayaran dengan pembayaran bertangguh (*deferred payment*) merupakan salah satu bentuk penyelesaian pembayaran atas L/C yang tidak menggunakan *draft* (wesel). Timbulnya jenis pembayaran ini berkaitan dengan pemberian fasilitas

---

<sup>130</sup> Soepriyo Andhibroto, *Op.Cit.*, Hal. 216-221.

pembayaran bertanggung oleh penjual kepada pembeli yang realisasinya dituangkan dalam suatu klausula yang disebutkan dalam L/C.

Jika penyerahan dokumen telah sesuai dengan syarat L/C, eksportir akan menerima surat pernyataan tertulis dari bank yang akan melakukan pembayaran pada tanggal jatuh waktu. Namun dimungkinkan eksportir dapat meminta pembayaran sebelum jatuh waktu dari bank pembayar. Pembayaran yang dilakukan sebelum atau pada jatuh waktu yang telah ditetapkan, paying bank tetap akan menerima *reimbursement* dari *issuing bank* menurut cara yang telah disetujui sebelumnya pada tanggal jatuh waktu tersebut.

### 3) Penyelesaian Pembayaran dengan Akseptasi

Penyelesaian pembayaran dengan akseptasi timbul karena penjual dapat menyetujui atau memberikan fasilitas pembayaran berjangka kepada pembeli. Penyelesaian pembayaran dengan akseptasi ini menggunakan wesel berjangka (*usance/time draft*).

Untuk memperoleh fasilitas pembayaran ini penjual tetap diwajibkan menyerahkan dokumen-dokumen yang disyaratkan disertai *draft* yang ditarik pada bank yang disebutkan dalam L/C dengan tenor atau *usance* yang telah ditetapkan.

Setelah dokumen-dokumen diperiksa dan jika ternyata memenuhi syarat serta kondisi yang ditetapkan dalam L/C, bank (*drawee bank* atau yang dikuasakannya) kemudian mengaksep wesel itu dan mengembalikannya kepada penjual. Tindakan bank memberikan akseptasi tersebut tentunya telah mendapatkan kuasa dari pihak *issuing bank*. Dengan mengaksep wesel tersebut berarti

*accepting bank* telah menyatakan komitmennya untuk membayar nilai wesel pada jatuh waktunya. Akan tetapi apabila pihak *beneficiary* menghendaki untuk menerima pembayaran sebelum waktunya ia dapat melakukan *discounting* pada banknya atau pada pasar uang lokal.

Langkah selanjutnya setelah memberikan akseptasi, pihak *accepting bank* kemudian mengirimkan dokumen-dokumen kepada *issuing bank* dan memberitahukan bahwa ia telah mengaksep wesel dan bahwa pada tanggal jatuh waktu yang telah ditetapkan akan melakukan pembayaran. Atas pembayaran yang telah dilakukannya itu *accepting bank* akan memperoleh *reimbursement* dan *issuing bank* menurut cara yang telah disetujui sebelumnya.

#### 4) Penyelesaian Pembayaran dengan Akseptasi

Untuk memperoleh pembayaran atas barang yang telah dikapalkan, pihak penjual menyerahkan kepada bank di mana L/C itu berlaku (*negotiating bank*) suatu bukti pengapalan barang dan dokumen-dokumen yang ditetapkan dalam L/C disertai dengan *sight draft* (atau tenor lain) yang ditarik pada pembeli atau pada tertarik (*drawee*) lain yang disebutkan pada L/C yang bersangkutan. Setelah bank memenuhi pemeriksaan dokumen dan ternyata telah memenuhi syarat serta kondisi yang ditetapkan dalam L/C, maka bank tersebut dapat mengambil alih (menegosiasi) draft itu atas dasar kuasa dari pihak *issuing bank*.

Langkah selanjutnya setelah menegosiasi draft itu, *negotiating bank* kemudian mengirimkan dokumen-dokumen itu beserta draft

kepada *issuing bank*, sedang reimbursement akan diperoleh menurut cara yang telah disetujui sebelumnya

### **BAB III**

#### **METODELOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan<sup>131</sup>. dalam melakukan penelitian ini agar terlaksana dengan baik dan maksimal, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

##### **A. Pendekatan permasalahan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah hukum ini adalah melalui pendekatan sosiologis atau *non doctrinal* dimana focus kajiannya adalah primer<sup>132</sup>. Pada penelitian hukum yang sosiologis, juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan data primer atau lapangan<sup>133</sup>.

##### **B. Karakteristik penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berubah bentuk, aktifitas, karakteristik,

---

<sup>131</sup> Mohammad Nazir, 1999, Metode Penelitian, Jakarta: Erlangga, hlm. 51

<sup>132</sup> Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Buku Pegangan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 47.

<sup>133</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Grafindo, hlm. 133

perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain<sup>134</sup>.

Penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisi dan interpretasi tentang arti data tersebut untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai Analisis Yuridis Pembayaran Melalui Internet Banking Dengan Menggunakan *Letter Of Credit*.

### **C. Sumber dan jenis bahan penelitian**

Sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder, dengan uraian sebagai berikut:

#### **a) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden yang terlibat dengan objek yang diteliti agar dapat memahami maksud dan tujuan dari data skunder yang ada. Dalam hal ini dilakukan oleh peneliti adalah dengan mewancarai langsung kepala BRI Unit Kota Tegal.

#### **b) Data Skunder**

Data skunder adalah data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data skunder adalah

---

<sup>134</sup> Nana Syaodih Sukamadinata, 2006, *Metode Penelitian Tindakan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 72



untuk mendukung data primer. Data skunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-undang
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
- 3) Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian
- 4) Informasi yang dikutip dari internet

#### **D. Pengumpulan bahan penelitian**

Untuk bahan penelitian yang lengkap dan relevan dengan pokok-pokok masalah yang akan dibahas maka dalam pengumpulan bahan penelitian ini dilakukan dengan cara :

##### **a. Studi Kepustakaan**

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data skunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat menginventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum yang baik, bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder.

##### **b. Studi Lapangan**

Dalam hal ini penulis melakukan dengan cara tanya kepada kepala Kantor BRI Unit Kota Tegal guna mendapat informasi yang benar berkaitan antara penelitian penulisan karya ilmiah hukum yang dibuat.

#### **E. Analisis bahan penelitian**

Analisis bahan penelitian yang dilakukan adalah analisis hukum dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan.

Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat<sup>135</sup>. Sehingga peneliti dapat menemukan fakta yang terjadi terhadap penelitian yang dilakukan.

---

<sup>135</sup> Ridwan, Pengertian-Penelitian-Deskriptif,[http:// ridwanaz.com/umum/ bahasa/pengertian-deskriptif/](http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-deskriptif/), diunduh pda hari rabu,tanggal 20 Oktober 2014 pukul: 08:25 WIB

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan :

1. Adanya penipuan dokumen menyebabkan batal demi hukumnya prinsip keterikatan dokumen. Ini ditandai dengan bank penegosiasi berhak atau wajib menolak pembayaran karena adanya penipuan, yang jelas bertentangan dengan prinsip keterikatan dokumen yang pada hakikatnya menyatakan bank hanya berurusan dengan dokumen saja, atau dapat diartikan bahwa apabila dokumen-dokumen yang diajukan *beneficiary* telah sesuai syarat dan kondisi L/C maka bank harus melakukan pembayaran. Kontrak jual beli (*sales contract* atau *purchase contract/order*) merupakan kontrak yang mendasari terbitnya sebuah L/C, akan tetapi L/C merupakan transaksi yang terpisah dari *sales contract* atau kontrak lainnya yang menjadi dasar L/C tersebut. Diketahuinya terjadi penipuan dokumen (*forged or fraudulent document*) pada saat dokumen sedang dinegosiasikan menyebabkan prinsip independensi yang merupakan karakteristik dari L/C menjadi batal demi hukum. Artinya kontrak-kontrak yang terkait dengan transaksi L/C, seperti kontrak jual beli (*sales contract*), kontrak penerbitan L/C, L/C sebagai kontrak serta kontrak keagenan diperlakukan sebagai kesatuan.

2. Diajukannya permohonan penolakan pembayaran oleh *applicant* kepada bank penerbit dalam hal terjadi penipuan dokumen menyebabkan bank penerbit berhak atau wajib menolak pembayaran apabila terpenuhi kriteria penipuan dokumen tersebut. Akan tetapi dalam hal terjadi penipuan, dapat saja bank penerbit menolak permohonan penolakan pembayaran dari *beneficiary* apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan pengecualian penipuan tidak berlaku atau dengan kata lain tindakan bank penerbit dapat menerima atau menolak permohonan penolakan pembayaran, yang berupa:

- a. Bank yang ditunjuk telah melakukan pembayaran atau negosiasi dengan itikad baik tanpa mengetahui adanya pemalsuan atau penipuan;
- b. Telah dilakukannya pembayaran kepada beneficiary oleh bank pengkonfirmasi yang melakukan pembayaran dengan itikad baik;
- c. Pemegang yang sah (holder in due course) dari wesel yang ditarik berdasarkan L/C setelah dilakukan akseptasi oleh bank pengaksep;
- d. Dijalankannya kewajiban oleh pihak yang menerima pengalihan kewajiban dari bank penerbit dan atau kewajiban dari bank yang ditunjuk yang telah dibayar dan tidak mengetahui adanya pemalsuan atau penipuan.

## **B. Saran**

1. Bagi *Applicant*/Importir/Pembeli

Terjadinya penipuan dokumen (*forged or fraudulent document*) merupakan hal yang merugikan bagi *applicant*, karena dalam hal ini *applicant* mengalami kerugian yang berupa tidak mendapat barang yang dibelinya, sampai kemungkinan tidak dikabulkan keinginannya untuk menolak pembayaran. Untuk menghindari hal-hal demikian, hal-hal yang harus dilakukan oleh *applicant* adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bukti-bukti terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan penolakan pembayaran kepada bank. Seringkali bank tidak dapat menolak pembayaran tanpa cukup bukti adanya penipuan pada pembiayaan perdagangan dengan L/C;
- b. Mengajukan *injunction* ke pengadilan, apabila setelah menyerahkan bukti-bukti yang mendukung adanya penipuan, tetapi bank belum mengabulkan permohonan penolakan pembayaran. Adapun *injunction* disamakan penetapan pengadilan, yang dalam pelaksanaan L/C hanya dapat ditetapkan dan dikeluarkan atas dasar penipuan (*fraud*).

## 2. Bagi Bank Penegosiasi dan/atau Bank Pembayar

Bank penegosiasi hendaknya memperhatikan hal-hal berikut sebelum melakukan negosiasi:

- a. Melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang akan dinegosiasikan dengan cermat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga adanya penipuan pada dokumen (*forged or fraudulent document*) dapat diminimalisir;

- b. Tidak melakukan pembayaran kepada *beneficiary* apabila diketahui ada penipuan dokumen. Jika bank penegosiasi tetap membayar meskipun mengetahui adanya penipuan maka tidak akan memperoleh pembayaran kembali dari bank penerbit (*issuing bank*) karena membayar dengan itikad tidak baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 4.
- Achmad,,Pengertian Internet dan Sejarah Internet', dalam <http://www.likethisya.com/pengertian-internet.html>, di akses pada tanggal 22 juli 2014.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, hlm. 133
- Aulia Rahman, ,Pengertian E-Banking dan M-Banking, serta penerapan E-Banking', dalam <http://safrilblog.wordpress.com/2013/07/03/pengertian-e-banking-dan-m-banking-serta-prinsip-penerapan-e-banking/>, di akses pada 22 juli 2014.
- Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 58.
- Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 21
- Etty Susilowati Suhardo, *Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri* (Semarang: FH UNDIP, 2001), hal.
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 5
- Hartono Hadisoeparto, *Kredit Berdokumen (Letter Of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*, Yogyakarta, Liberty Offset, 1991, Hal. 2
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia-Jilid 4: Hukum Jual Beli Perusahaan*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003), hal. perdagangan..
- C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia-Aspek Hukum Daiwa Ekonomi-bagian* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hal.
- Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor*, (Jakarta: Erlangga1989), hal. 1.
- Khairy Mahdi, 'Pengertian Internet Banking', dalam [ttp://elektronikbanking.blogspot.com/2012/08/pengertian-internet-banking\\_27.html?m=1](http://elektronikbanking.blogspot.com/2012/08/pengertian-internet-banking_27.html?m=1), diakses pada 22 juli 2014
- Mohammad Nazir, 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta: Erlangga, hlm. 51

Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Buku Pegangan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 47.

Nana Syaodih Sukamadinata, 2006, Metode Penelitian Tindakan, Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 72

Ridwan, Pengertian-Penelitian-Deskriptif, <http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-deskriptif/>, diunduh pada hari rabu, tanggal 20 Oktober 2014 pukul: 08:25 WIB